



**BP BATAM**  
Badan Pengusahaan Batam

# RENCANA STRATEGIS BP BATAM

2025-2029

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR KEPALA BP BATAM</b> .....	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR WAKIL KEPALA BP BATAM</b> .....	<b>IV</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>V</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>IX</b>
1.1    KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 <i>Capaian KPBPB Batam 2020- 2024</i> .....	2
1.1.2 <i>Capaian Renstra BP Batam 2020-2024</i> .....	5
1.1.3 <i>Tantangan Pengembangan KPBPB Batam 2025–2029</i> .....	11
1.1.3.1    Tantangan Kewilayahan KPBPB .....	11
1.1.3.2    Tantangan Kelembagaan BP Batam .....	13
1.1.4 <i>Aspirasi Pemangku Kepentingan</i> .....	13
1.1.5 <i>Target Ekonomi Makro KPBPB Batam 2025-2029</i> .....	15
1.2    POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	19
1.2.1 <i>Potensi</i> .....	19
1.2.2 <i>Permasalahan</i> .....	25
1.2.3 <i>Analisis SWOT</i> .....	27
<b>BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>30</b>
2.1    VISI.....	31
2.2    MISI .....	31
2.3    TUJUAN .....	32
2.4    SASARAN STRATEGIS.....	32
2.5    INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAN INDIKASI RISIKO .....	32
2.6    SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM .....	36
<b>BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>39</b>
3.1    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .....	40
3.1.1 <i>Arah Kebijakan RPJPN dan RPJMN</i> .....	40
3.1.2 <i>Arah Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun</i> .....	47
3.2    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BP BATAM .....	50
3.2.1 <i>Arah Kebijakan BP Batam</i> .....	51
3.2.2 <i>Strategi BP Batam</i> .....	52
3.3    PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS.....	54

3.3.1	<i>Wilayah Penataan dan Pengembangan</i>	55
3.3.2	<i>Proyek Strategis Nasional (PSN)</i>	56
3.4	SEKTOR PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	59
3.5	KERANGKA REGULASI	74
3.6	KERANGKA KELEMBAGAAN	77
<b>BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>		<b>81</b>
4.1	TARGET KINERJA	82
LUAS LAHAN, PESISIR, DAN REKLAMASI YANG DIALOKASIKAN UNTUK INVESTASI		84
4.1.1	<i>Pelaksana Kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis</i>	87
4.1.2	<i>Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen</i>	92
4.2.	KERANGKA PENDANAAN	94
4.2.1.	<i>Kerangka Pendanaan sumber PNBPN</i>	94
4.2.2.	<i>Kerangka Pendanaan sumber Non-APBN</i>	97
4.3.	KERANGKA PENDANAAN PROGRAM BP BATAM	99
4.3.1.	<i>Kerangka Pendanaan Program Pengembangan Kawasan Strategis</i>	99
4.3.2.	<i>Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen</i>	100
<b>BAB 5 PENUTUP</b>		<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>102</b>
<i>Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029</i>		
<i>Lampiran 2. Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Pendanaan APBN dan Non-APBN Tahun 2025-2029</i>		
<i>Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029</i>		

## **KATA PENGANTAR**

### *KEPALA BP BATAM*

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BP Batam untuk periode lima tahun mendatang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Arah dan kebijakan pembangunan KPBPB Batam merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintang Karimun (Rinduk BBK).

Dokumen Renstra akan menjadi acuan bagi BP Batam dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam selama 5 (lima) tahun ke depan dalam tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan BP Batam antara lain dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan Laporan Kinerja (LKj).

Akhirnya, atas izin Allah SWT serta upaya dari seluruh jajaran BP Batam dan pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih dan harapan untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan pencapaian seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BP Batam ini demi tercapainya kesuksesan program pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi yang maju dan berkelanjutan.

Batam, Oktober 2025  
Kepala Badan Pengusahaan Batam

**Amsakar Achmad**



## **KATA PENGANTAR**

### **WAKIL KEPALA BP BATAM**

Terima kasih atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BP Batam untuk tahun 2025-2029. Dokumen Renstra memberikan arah pencapaian kinerja BP Batam selama 5 tahun ke depan. Dengan target-target yang telah disusun bersama maka semestinya menjadi tanggung jawab bersama pula untuk mencapainya.

Adapun target realisasi investasi sebagai target kinerja utama BP Batam menunjukkan usaha BP Batam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk memenuhi arahan Bapak Presiden Prabowo yakni pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10% pada tahun 2029. Untuk memenuhi harapan ini maka kami berkomitmen menjadikan Batam sebagai Kota yang menarik untuk berinvestasi melalui kemudahan perizinan, penyelesaian permasalahan lahan, tata kota yang indah, serta peningkatan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dan pengusaha. Hal ini tentunya kami lakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan BP Batam selama 5 tahun. Target setiap unit telah dijabarkan, dan akan dievaluasi setiap tahun serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana tahunan, penganggaran, sampai evaluasi dan laporan kinerja.

Tentu saja kami menyadari bahwasanya dalam rangka pemenuhan target-target ini BP Batam mengharapkan peran semua pihak untuk bersinergi dalam rangka mewujudkan Visi BP Batam sebagai Kawasan Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan.

Batam, Oktober 2025  
Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam



**Li Claudia Chandra**

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam) yang selanjutnya disingkat BP Batam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta pendanaan dalam tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Renstra BP Batam 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Pada bagian awal Renstra BP Batam ini diuraikan kondisi umum yang merepresentasikan pencapaian sasaran pembangunan KPBPB Batam dan kinerja BP Batam selama tahun 2020-2024 serta tantangan pembangunan global dan regional dalam 5 (lima) tahun mendatang. Capaian tersebut menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi mandiri atas langkah-langkah yang telah diambil pada kurun waktu 2020-2024 dan menjadi titik tolak dalam merumuskan kebijakan untuk periode 2025-2029.

Sebagai lembaga/instansi Pemerintah Pusat, BP Batam diberi mandat melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam. Disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BP Batam terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis dan merupakan harapan pemangku kepentingan kepada BP Batam yang akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra BP Batam 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, maka BP Batam telah merumuskan visi untuk tahun 2025 sampai 2029 adalah: *“Kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*. Untuk mewujudkan Visinya, BP Batam memiliki 2 (dua) misi, yaitu: 1) Menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan investasi bernilai tinggi; dan 2) Meningkatkan kinerja kelembagaan BP Batam yang efektif dan efisien. Untuk

mencapai visi dan misi tersebut, BP Batam menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu: 1) KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial; dan 2) Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun sasaran strategis dan indikatornya serta target kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target Kinerja						
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1	Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp	46,29 T	52,31 T	59,56 T	68,23 T	78,56 T*
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan umum dan kawasan	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
		3	Nilai realisasi PNBP BP Batam	Rp	1,99 T	2,44 T	2,64 T	2,84 T	3,07 T**
3	Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA

**Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Program BP Batam 2025-2029**

Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus kepada BP Batam melalui pertemuan pada tanggal 12 Maret 2025 dan 22 Mei 2025 di Istana Negara Jakarta dan memberikan arahan agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga kesejahteraan masyarakat dapat didesak untuk meningkatkan daya saing KPBPB Batam. Hal tersebut sejalan dengan upaya Batam dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sesuai RPJMN 2025-2029. Adapun arahan Bapak Presiden yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat simplifikasi perizinan yang transparan dan akuntabel;
2. Melakukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan investasi;

3. Selesaikan persoalan kepemilikan lahan non produktif;
4. Mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang dengan tetap menjaga iklim investasi;
5. Optimalisasi sektor strategis seperti Kawasan Industri, galangan kapal, logistik untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional;
6. Jadikan Batam menarik sebagai destinasi investasi;
7. Kembangkan Batam menjadi kota yang indah, nyaman & menarik bagi penduduk serta pekerja; dan
8. Pengelolaan investasi Batam bisa memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Hal tersebut menjadi pemacu BP Batam sejalan dengan upaya Batam dalam meningkatkan realisasi investasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10 persen pada 2029. Upaya ini akan diterjemahkan menjadi strategi pembangunan KPBPB Batam yang akan ditempuh dalam tahun 2025 sampai dengan 2029 yaitu:

1. Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: *hub logistik internasional*, kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai tambah, digital dan kreatif, perdagangan internasional dan pusat keuangan, dan wisata kesehatan terpadu;
2. Pengembangan kawasan strategis prioritas di Batam dalam kerangka wilayah penataan dan pengembangan (WPP);
3. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam;
5. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan berbasis teknologi informasi; dan
6. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

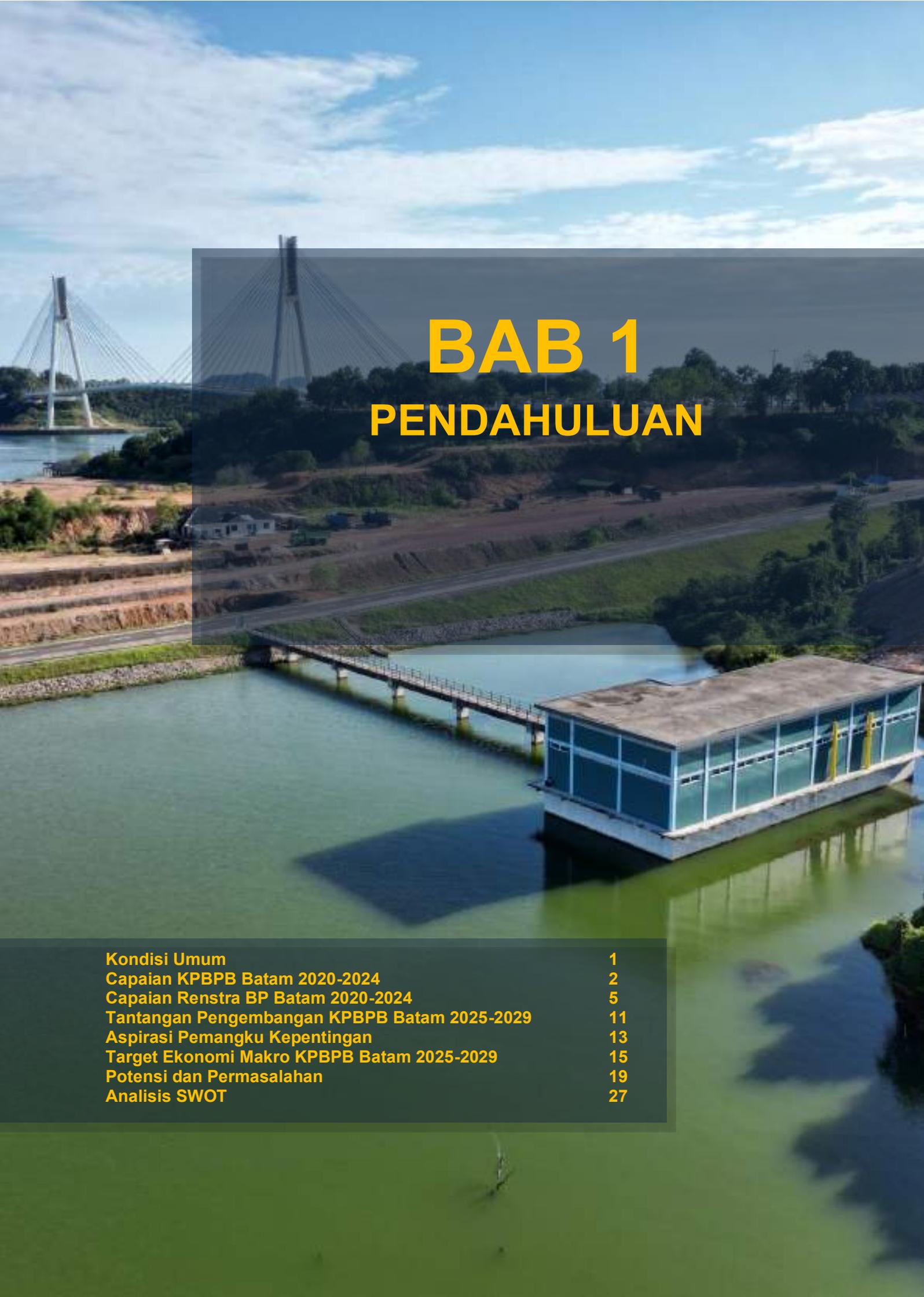
Dengan beberapa strategi pembangunan yang akan ditempuh diharapkan akan memberikan *output/outcome* yang dihasilkan meliputi:

1. Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam terakumulasi selama lima tahun sebesar Rp304,9 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 10% pada tahun 2029;

2. Tercapainya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dan kawasan dengan predikat “sangat baik”;
3. Nilai realisasi PNBK BP Batam selama lima tahun sebesar Rp13 triliun; dan
4. Tercapainya indeks reformasi birokrasi dengan predikat AA pada tahun 2029.

Selain itu, Renstra BP Batam memuat berbagai langkah (*measures*), baik langkah administratif (*administrative measures*) maupun kebijakan (*policy measures*) yang diharapkan dapat mendukung suksesnya berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2025-2029 serta mengikuti pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Pada akhirnya diharapkan Renstra ini dapat menjadi panduan yang representatif bagi BP Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam menghasilkan kinerja yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan di bidang pembangunan serta partisipasi BP Batam dalam peningkatan ekonomi dan investasi di KPBPB Batam.

An aerial photograph of a water treatment facility. In the foreground, a large rectangular concrete structure with a flat roof and blue-tinted glass walls sits in a body of greenish water. A concrete walkway with a metal railing leads from the shore to the structure. In the background, a large cable-stayed bridge with two tall white pylons spans across a river. The sky is blue with scattered white clouds.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

<b>Kondisi Umum</b>	<b>1</b>
<b>Capaian KPBPB Batam 2020-2024</b>	<b>2</b>
<b>Capaian Renstra BP Batam 2020-2024</b>	<b>5</b>
<b>Tantangan Pengembangan KPBPB Batam 2025-2029</b>	<b>11</b>
<b>Aspirasi Pemangku Kepentingan</b>	<b>13</b>
<b>Target Ekonomi Makro KPBPB Batam 2025-2029</b>	<b>15</b>
<b>Potensi dan Permasalahan</b>	<b>19</b>
<b>Analisis SWOT</b>	<b>27</b>

## 1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam) yang selanjutnya disingkat Renstra BP Batam merupakan sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam) jangka menengah tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah disusun mengikuti pedoman penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sebagai langkah konkret dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 yang disusun sebagai fondasi awal untuk meneruskan kemajuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", untuk itu, Renstra BP Batam telah disusun agar mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi Pemerintah sesuai dengan RPJMN 2025-2029 yakni "Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Penyusunan dokumen Renstra BP Batam merupakan penjabaran tugas dan fungsi BP Batam yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dengan hasil akhir berupa pencapaian visi dan misi BP Batam tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra BP Batam 2025-2029 juga merujuk pada Rencana Induk BBK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun dan bersifat indikatif yaitu bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang ingin dicapai dan bersifat tidak kaku.

Penyusunan Renstra BP Batam ini tidak terlepas dari visi dan misi dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memiliki sasaran

meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Pencapaian visi dan misi ini pada akhirnya diukur dengan pencapaian indikator sasaran strategis yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala BP Batam setiap tahunnya. Capaian kinerja Rencana Strategis periode sebelumnya yaitu tahun 2020-2024 dapat digunakan sebagai tolak ukur dan/atau dasar (*baseline*) dalam menetapkan target kinerja pada periode ini, disertai dengan pertimbangan perhitungan ekonomi makro dan melibatkan aspirasi masyarakat serta masukan *stakeholder* dalam rangka peningkatan pelayanan yang diukur melalui survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan setiap tahun.

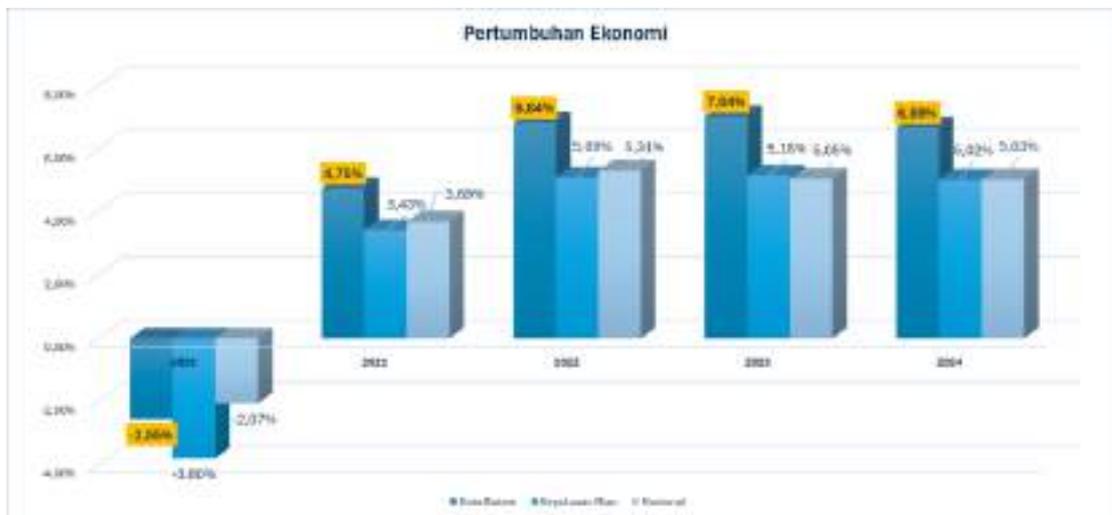
Indikator nilai realisasi investasi adalah indikator yang merepresentasikan BP Batam sebagai Pengelola KPBPB, sedangkan aspek pelayanan publik yang berkualitas merupakan aspek yang krusial bagi BP Batam sebagai lembaga pemerintah yang menerima manfaat dari layanan yang diberikan berupa peningkatan pendapatan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penyusunan Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penetapan program dan kegiatan yang disusun BP Batam setiap tahunnya dalam rangka pembangunan KPBPB Batam yang terencana, berkesinambungan, dan terfokus untuk mencapai hasil akhir berupa KPBPB Batam yang berdaya saing serta mendukung pencapaian target RPJMN yang telah ditetapkan.

### **1.1.1 Capaian KPBPB Batam 2020- 2024**

Sepanjang rentang waktu 2020-2024, pelaksanaan pembangunan KPBPB Batam terpengaruh oleh tekanan perekonomian global. Diantaranya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya kontraksi sosial ekonomi dan disrupti rantai pasok hingga tahun 2021, ketidakpastian geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan inflasi global dan berpengaruh pada harga pangan dunia, perubahan iklim yang berpengaruh pada terjadinya bencana alam, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mempengaruhi stabilitas perdagangan dunia, revolusi industri pada berbagai sektor yang menjadi buah dari pandemi Covid-19 dan menjadi tantangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan utang global akibat dari stimulus pandemi Covid-19.

Dampak pandemi *Covid-19* masih berlanjut pada tahun 2020, perekonomian Batam mengalami kontraksi yang menyebabkan perlambatan ekonomi sebesar -2,55% dan kontraksi ini lebih ringan dibandingkan rata-rata di Kepulauan Riau sebesar -3,80% dan cukup kompetitif dibandingkan angka nasional sebesar -2,07%. Kondisi ini masih terkendali mengingat saat masa pandemi *Covid-19* Batam tidak mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk keberlangsungan industri di KPBPB Batam, namun tetap dilakukan berhasil tumbuh 4,75% pada tahun 2021, 6,84% pada tahun 2022, 7,04% tahun 2023, dan 6,69% pada tahun 2024. Dalam lima tahun tersebut, pergerakan perekonomian Batam lebih baik dibandingkan perekonomian Kepulauan Riau maupun Nasional.



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Batam, Kepulauan Riau, dan Nasional 2020-2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)*

Dampak yang diberikan pandemi *Covid-19* mempengaruhi pergerakan ekonomi Batam khususnya pada lapangan usaha konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Di antara empat lapangan usaha tersebut, lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang hingga kini belum sepenuhnya mengalami pemulihan secara keseluruhan dimana angka kontribusinya masih mengalami penurunan berlanjut. Disisi lain sektor

pengolahan sebagai penyumbang terbesar dan penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam, justru mengalami peningkatan distribusi pada tahun 2020 saat pandemi *Covid-19*. Hal ini didukung oleh peningkatan nilai ekspor tahun 2020 pada jenis komoditi mesin/peralatan listrik dan benda-benda dari besi dan baja yang merupakan komponen pendukung industri pengolahan. Adapun penopang PDRB terbesar kedua yaitu pada sektor konstruksi yang sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 namun kini telah kembali tumbuh normal, hal ini tentu tidak lepas dengan pembangunan yang dilakukan BP Batam sepanjang 2020-2024 seperti pengembangan pelabuhan Batu Ampar dan Kabil, pengembangan bandara Hang Nadim, Penyediaan air bersih yaitu pembangunan instalasi pengelolaan air dan pipa jaringan distribusi, pembangunan jalan dan peningkatan drainase, pengembangan pelayanan dan peralatan rumah sakit BP Batam, serta pembangunan fasilitas wisata dan edukasi.

Capaian Pembangunan KPBPB Batam 2020-2024 dapat dilihat dari realisasi investasi yang mencerminkan keberhasilan BP Batam dalam mencapai visi dan misi. Tercapainya target realisasi investasi menunjukkan terciptanya iklim usaha yang kondusif, infrastruktur yang memadai, serta stabilitas politik dan ekonomi. Investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan infrastruktur sektor strategis.



**Gambar 1.2 Realisasi Investasi Batam Tahun 2020-2024**

Sumber: Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK (diolah)

Dalam tahun 2020, total investasi di Batam tercatat mencapai 23,06 triliun rupiah, dengan kontribusi yang cukup dominan dari PMDN sebesar 13,69 triliun rupiah, sementara PMA menyumbang 9,37 triliun rupiah yang mencerminkan stabilitas investasi meski berada di tengah tantangan global, seperti pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi iklim ekonomi secara umum. Namun, tahun 2021 mencatat penurunan yang signifikan, dengan total investasi turun menjadi 14,88 triliun rupiah dan relatif rata antara PMDN dan PMA yaitu PMDN mencapai 7,52 triliun rupiah, sementara PMA sedikit lebih rendah di angka 7,36 triliun rupiah.

Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022, ditunjukkan dari total investasi yang meningkat drastis menjadi 30,40 triliun rupiah. Lonjakan ini didorong oleh pertumbuhan signifikan dalam PMA yang naik menjadi 26,06 triliun rupiah, sedangkan kontribusi PMDN berada di angka 4,34 triliun rupiah. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan total investasi yang kembali mencatatkan peningkatan menjadi 32,98 triliun rupiah dengan PMA tetap menjadi motor penggerak utama yang berkontribusi sebesar 26,19 triliun rupiah, sementara PMDN juga mengalami peningkatan menjadi 6,79 triliun rupiah.

Dalam tahun 2024, Secara keseluruhan total investasi melonjak hingga 43,26 triliun rupiah, dengan PMA mencapai 35,19 triliun rupiah, sementara PMDN menyumbang sebesar 8,16 triliun rupiah.

Dominasi PMA menunjukkan daya tarik KPBPB Batam sebagai lokasi strategis untuk investasi global, sementara peningkatan bertahap dalam PMDN mencerminkan tumbuhnya kepercayaan pelaku usaha dalam negeri terhadap prospek ekonomi lokal.

### **1.1.2 Capaian Renstra BP Batam 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang KPBPB Batam, BP Batam memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi pada sektor pertanian,

perdagangan, maritim, perindustrian, transportasi, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, kesehatan, sumber daya air, limbah dan lingkungan, farmasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kebudayaan, telekomunikasi, dan bidang lainnya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra BP Batam 2020-2024 memuat 2 (dua) tujuan:

1. Mewujudkan KPBPB Batam sebagai tujuan investasi di Indonesia. Tujuan ini dijabarkan menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis, yakni:
  - a. Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam;
  - b. Meningkatnya prasarana dan sarana pendukung investasi di KPBPB Batam;
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan; dan
  - d. Optimalisasi pemanfaatan aset BLU.
2. Mewujudkan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani. Tujuan ini dijabarkan menjadi 1 (Satu) Sasaran Strategis, yakni:
  - a. Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani.

Selanjutnya dari sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, yang target dan capaian tiap tahunnya dapat terlihat pada tabel di berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	satuan	Target					Realisasi Capaian					Persentase Realisasi Capaian					Rata-Rata
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1 Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam	Triliun rupiah	23	25	27	31	35	23,06	14,88	30,4	32,98	43,26	100,26%	59,52%	112,59%	106%	124%	99,09%
2	Meningkatnya prasarana dan sarana pendukung investasi di KPBPB Batam	2 Persentase pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di KPBPB Batam	Persen	100	100	100	100	100	75	100	97	100	98,11	75,00%	100,00%	96,88%	100,00%	98%	89,92%
		3 Persentase penyelesaian pengembangan kawasan berwawasan lingkungan dan energi baru terbarukan	Persen	-	-	100	100	100	-	-	100	100	96,55	-	-	100%	100%	97%	94,15%
		4 Persentase penyelesaian pengembangan kawasan yang mendukung edukasi, UMKM, dan pariwisata	Persen	100	100	100	100	100	57,5	100	93	100	100	57,50%	100%	93,00%	100%	100%	90,10%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	5 Persentase ketepatan waktu penyelesaian perijinan	Persen	-	100	100	100	100	-	80,2	95,75	100	100	-	80,50%	97,75%	100%	100%	91,07%
		6 Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	85	85	86	86	86	84,1	83,86	81,69	84,03	87,02	98,94%	98,66%	96,11%	98%	101%	98,96%
4	Optimalisasi pemanfaatan aset BLU	7 Nilai realisasi PNBP	Triliun Rupiah	1,3	1,67	2,09	2,26	2,47	1,02	1,42	1,96	1,94	2,29	78,46%	85,03%	93,78%	85,84%	93%	83,84%
		8 Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	Persen	100	100	100	100	100	83	125	105,46	100	100	83,00%	125%	105,46%	100%	100%	101,24%
5	Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani	9 Persentase penyelesaian perencanaan pengembangan KPBPB Batam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99,69	100	100	100%	100%	99,69%	100%	100%	98,32%
		10 Pengembangan pelaksanaan <i>Merit System</i>	Indeks	-	-	-	275	275	-	-	-	278	-	-	-	-	101%	-	101,09%
														84,74%	93,59%	99,47%	99,10%	101,35%	<b>94,78%</b>

**Tabel 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024**

Sumber: BP Batam, 2025

Indikator Sasaran Strategis **pertama** yaitu nilai realisasi investasi di KPBPB Batam. Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 KPBPB Batam memperoleh rata-rata capaian realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 99,09% dari target yang telah ditetapkan. Adanya pencapaian yang berbeda setiap tahunnya merefleksikan dinamika dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam menghadapi pandemi global serta pemulihan ekonomi.

Indikator Sasaran Strategis **kedua** adalah persentase pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang terealisasi dengan jumlah yang direncanakan dalam dokumen rencana kerja awal tahun. Rata-rata capaian realisasi indikator ini mencapai 89,92% dari target yang ditetapkan untuk periode 2020-2024. Capaian tersebut menggambarkan komitmen BP Batam dalam memastikan kesiapan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi elemen dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing kawasan di tingkat nasional maupun internasional.

Indikator Sasaran Strategis **ketiga** adalah Persentase Penyelesaian Pengembangan Kawasan Berwawasan Lingkungan dan Energi Baru Terbarukan. Indikator ini diukur dengan pembobotan capaian kegiatan pengembangan kawasan berwawasan lingkungan dan energi terbarukan yang terealisasi. Rata-rata capaian penyelesaian pengembangan kawasan berwawasan lingkungan dan energi baru terbarukan mencapai 94,15% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen BP Batam dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Indikator Sasaran Strategis **keempat** adalah Persentase Penyelesaian Pengembangan Kawasan yang Mendukung Edukasi, UMKM, dan Pariwisata. Indikator ini diukur dengan pembobotan capaian kegiatan pengembangan kawasan yang mendukung Edukasi, UMKM, dan Pariwisata yang terealisasi diantaranya adalah pengembangan taman kolam, taman rusa, *fisherism*,

agrowisata temiang, dan ex. camp Vietnam. Rata-rata capaian hingga tahun 2024 sebesar 90,10% dari target yang ditetapkan.

Indikator Sasaran Strategis **kelima** adalah Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan. Indikator ini diukur dengan pembobotan capaian kinerja tiap perizinan diantaranya adalah perizinan pertanahan, perizinan pemasukan barang, perizinan berusaha, dan perizinan pemasangan sambungan air bersih. Tercatat rata-rata capaian sebesar 91,07% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun angka ini menunjukkan progres yang signifikan, capaian tersebut juga menandakan adanya ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal ketepatan waktu penyelesaian. Ketepatan waktu dalam penyelesaian perizinan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap daya tarik investasi dan kepuasan para pelaku usaha.

Indikator Sasaran Strategis **keenam** adalah tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BP Batam mencapai 98,96% dari target yang ditetapkan.

Indikator Sasaran Strategis **ketujuh** adalah Nilai Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Indikator ini mengukur tingkat capaian nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terealisasi selama periode 2020 hingga 2024. Rata-rata realisasi PNBP mencapai 83,84% dari target yang telah ditetapkan untuk periode tersebut. Hal tersebut menjadi evaluasi terhadap pelayanan BP Batam agar dapat mengoptimalkan layanannya sehingga memberikan peningkatan PNBP dalam periode berikutnya.

Indikator Sasaran Strategis **kedelapan** adalah Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). Nilai capaian Modernisasi pengelolaan BLU dihitung dari persentase penyelesaian

pengembangan sistem informasi BLU berdasarkan optimalisasi pengelolaan data pada aplikasi BIOS dan kelengkapan tahapan yang diselesaikan. Kelengkapan tahapan modernisasi BLU ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan RI setiap tahun kepada BP Batam. Modernisasi pengelolaan BLU di BP Batam berhasil mencapai melebihi dari targetnya yaitu sebesar 101,24%. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi sistem yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi.

Indikator Sasaran Strategis **kesembilan** adalah Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengembangan KPBPB Batam. Penyelesaian perencanaan pengembangan KPBPB Batam mencapai rata-rata 98,32% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen BP Batam dalam memastikan rencana pengembangan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan strategis kawasan.

Indikator Sasaran Strategis **kesepuluh** adalah Pengembangan Pelaksanaan Merit Sistem. Pelaksanaan Merit Sistem menunjukkan capaian maksimal dengan rata-rata 101,09%. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi, transparansi, dan keadilan. Pencapaian ini juga mendukung profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan organisasi.

Selain dari capaian yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja di atas, beberapa prestasi BP Batam dalam kurun waktu 2020-2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali untuk laporan keuangan BP Batam untuk setiap tahun secara berturut-turut sejak 2016 sampai tahun 2024;
2. BP Batam berhasil melaksanakan kerjasama pemanfaatan aset diantaranya pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Konsorsium PT. Bandara Internasional Batam (BIB) pada tahun 2021, Kerjasama Sistem Pengelolaan Air Bersih pada tahun 2022, Kerjasama Pengelolaan Dermaga

- Utara Pelabuhan Batu Ampar dengan PT. Persero pada tahun 2023, dan Kerjasama Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Center dengan PT. Metro Nusantara Bahari pada tahun 2024; dan
3. BP Batam menjalankan amanat dari Presiden untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah KPBPB Batam guna percepatan pengembangan kawasan dan peningkatan investasi. Adapun pada tahun 2024, telah ditetapkan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang berlokasi di Sekupang dan Nongsa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2024. Adapun di Batam telah berdiri 2 KEK yaitu KEK Batam Aero Teknik (BAT) di kawasan bandara yang bergerak dibidang *Maintenance, Repair, Overhaul* (MRO) dan KEK Nongsa sebagai kawasan digital dan kreatif.

### **1.1.3 Tantangan Pengembangan KPBPB Batam 2025–2029**

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam menghadapi tantangan lima tahun kedepan, kawasan ini dihadapkan pada berbagai tantangan sehingga membutuhkan perhitungan yang cermat dan terukur dalam pengelolaannya dan langkah yang taktis dan strategis dalam pelaksanaannya agar berdaya saing tinggi. Tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama yaitu Kewilayahan KPBPB dan Kelembagaan BP Batam.

#### **1.1.3.1 Tantangan Kewilayahan KPBPB Persaingan Kawasan Industri Internasional**

Adanya persaingan kawasan industri internasional terutama dengan munculnya kawasan Free Trade Zone (FTZ) sejenis di negara-negara seperti China, Vietnam, dan Malaysia. Jika kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) tidak dikelola secara inovatif dan kompetitif, potensi kehilangan daya tarik investasi akan semakin besar.

#### **Revolusi Industri 4.0**

Era Revolusi Industri 4.0 membawa tantangan signifikan dengan prediksi bahwa sekitar 60% pekerjaan manusia akan tergantikan oleh otomatisasi dan

teknologi kecerdasan buatan/ akal imitasi (AI). Hal ini memerlukan upaya pengembangan tenaga kerja yang berorientasi pada teknologi, peningkatan kompetensi digital, dan menciptakan SDM yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

### **Ketersediaan lahan untuk Investasi**

Ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama, terutama karena sebagian besar kawasan pesisir dan perairan yang akan direklamasi belum dapat diberikan untuk tujuan pengembangan kawasan sehingga berdampak pada investasi di KPBPB Batam. Saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk itu diperlukan peraturan turunan pelaksanaan utamanya dalam pengelolaan kawasan pesisir dan reklamasi.

### **Permasalahan Pemukiman Ilegal (Rumah Liar)**

Permasalahan rumah liar di KPBPB Batam memerlukan pendekatan yang humanis dan solutif agar terciptanya kondisi masyarakat yang tetap kondusif untuk menjaga iklim investasi. Program penyediaan rumah susun menjadi salah satu langkah konkrit yang ditawarkan dan sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

### **Pengembangan kawasan terintegrasi Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)**

Sebagai kawasan yang berada di jalur strategis Selat Malaka, BBK memiliki potensi besar untuk menjadi pusat logistik dan perdagangan internasional. Selain itu, kawasan ini juga berperan sebagai pintu utama masuknya investasi, barang, dan jasa. Optimalisasi pengembangan kawasan ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat distribusi dan perdagangan.

## **Ketersediaan Air dan Energi**

Kebutuhan air bersih di kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang) diperkirakan akan mengalami defisit pada tahun 2030 jika tidak ada upaya mitigasi. Untuk itu, diperlukan pengembangan sumber air baku alternatif, seperti instalasi desalinasi air laut (SWRO) dan pembangunan waduk baru. Begitu pula kebutuhan energi, yang harus dipenuhi secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas investasi dan penduduk di kawasan ini.

### **1.1.3.2 Tantangan Kelembagaan BP Batam Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah**

Perlu adanya harmonisasi hubungan kerja antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan kawasan.

### **Harmonisasi Regulasi**

Harmonisasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dengan regulasi kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Penyelarasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pengelolaan kawasan.

### **Kapasitas kelembagaan BP Batam**

BP Batam menghadapi tantangan dalam mempertegas statusnya sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) atau Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui jenjang karier yang jelas dan sistem kepegawaian yang terstruktur juga diperlukan untuk mendukung kinerja kelembagaan.

### **1.1.4 Aspirasi Pemangku Kepentingan**

#### **a. Kementerian PPN/Bappenas**

Dalam RPJMN 2025-2029, wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Untuk mendukung tujuan ini, BP Batam diharapkan dapat

mengimplementasikan pengembangan dalam dua konteks yaitu Koridor Industri: *Batam Smart Industrial And Logistic Hub* dan konteks kawasan perkotaan: *Batam Dynamic Sister City of Singapore*.

**b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

Kemenko Perekonomian menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur Batam-Bintan-Karimun (BBK) yang terintegrasi dan saling mendukung. Infrastruktur ini harus dapat mengoptimalkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus investasi, dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah harmonisasi regulasi perizinan untuk memudahkan proses investasi. Selain itu, promosi BBK di pasar internasional juga perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investor global.

**c. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri**

Kadin Kepri menilai bahwa sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada di Batam perlu dilakukan perbaikan, terutama untuk beberapa izin terkait lingkungan, seperti Amdal, andalalin, dan KKPR yang saat ini masih harus melalui proses panjang di Kantor Pusat Kementerian terkait di Jakarta. Hal ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kemudahan dalam perizinan, guna mempercepat proses investasi dan mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan perizinan.

**d. Kadin Batam**

Kadin Batam menekankan pentingnya potensi Batam dalam industri logistik. Diharapkan proses perizinan di Batam dapat lebih memudahkan perusahaan lokal untuk bersaing di pasar global. Renstra BP Batam juga diharapkan dapat menjadi sarana *transfer knowledge* yang bermanfaat, baik bagi pengusaha lokal maupun calon investor, guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

**e. Batam Shipyard and Offshore Assosiation (BSOA)**

BSOA mengajukan kebutuhan untuk memperbaiki dan memperluas alur utama yang mendukung kegiatan *Repair & Maintenance* kapal besar, terutama di kawasan Tanjung Uncang dan Batu Ampar. Selain itu,

pengelolaan limbah B3 juga perlu ditingkatkan, karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut masih belum dikelola secara optimal. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan limbah yang baik akan mendukung keberlanjutan industri maritim Batam serta memenuhi standar lingkungan.

**f. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)**

Apindo menyoroti pentingnya Batam untuk mendukung perusahaan yang mengimplementasikan *green energy* dan *renewable energy* dalam operasional mereka. Perusahaan yang sudah memanfaatkan energi ramah lingkungan diharapkan dapat memperoleh sertifikat *renewable energy* sebagai bentuk pengakuan. Dalam hal ini, BP Batam diharapkan berperan dalam membantu memperoleh sertifikat tersebut, serta mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan dalam operasional mereka.

**g. Nongsa Digital Park**

Nongsa Digital Park (NDP) mengemukakan bahwa untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan kawasan ini, ketersediaan listrik dan air yang cukup sangat penting. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan infrastruktur yang handal akan mendukung Batam sebagai destinasi utama bagi perusahaan teknologi dan digital yang berorientasi internasional.

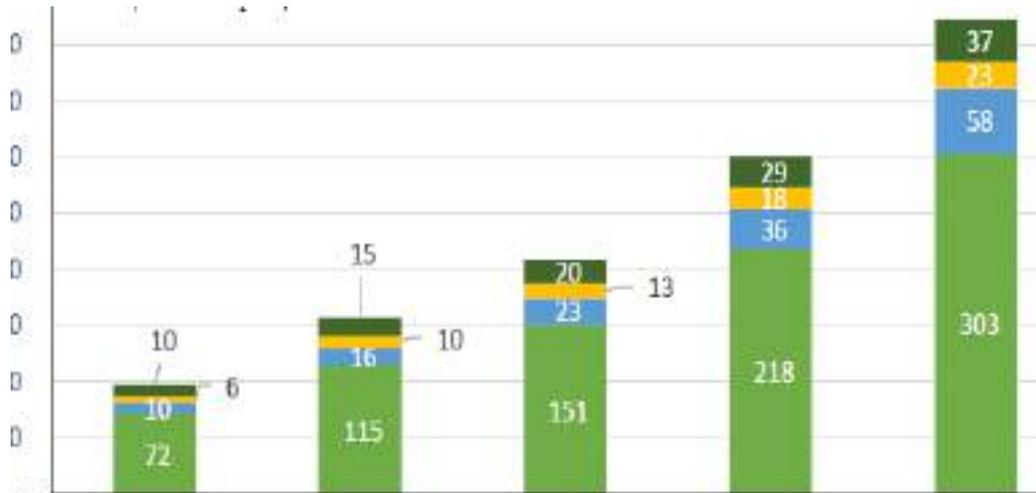
**1.1.5 Target Ekonomi Makro KPBPB Batam 2025-2029**

Skenario arah pengembangan Kawasan BBK meliputi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi ke dalam 3 (tiga) skenario utama. Pertama, Skenario Pesimis dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara historis pada Kawasan BBK. Kedua, Skenario Moderat dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi dalam Perencanaan masing-masing kabupaten kota di Kawasan BBK. Ketiga, Skenario Optimis dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga skenario tersebut membedakan derajat ekspansi ekonomi Kawasan

BBK di mana Skenario Pesimis memiliki asumsi pengembangan paling konservatif, sementara Skenario Optimis memiliki asumsi pengembangan ekonomi paling progresif.

Berdasarkan pertimbangan tren pertumbuhan ekonomi saat ini, atas kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada KPBPB, maka dipilih Skenario Optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2022-2046. Pemilihan Skenario Optimis tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya kebijakan nasional melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang menata ulang pelaksanaan KPBPB BBK mulai dari perencanaan dan pengembangan kawasan yang terintegrasi, penataan kelembagaan, pengaturan kebijakan perizinan dan investasi, hingga pengaturan terkait fasilitas dan kemudahan di KPBPB BBK. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pemilihan Skenario Optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2021-2045 menjadi acuan dasar dalam penentuan proyeksi data perekonomian lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut rincian proyeksi kebutuhan investasi di Kawasan BBK untuk Skenario Optimis ditargetkan rata-rata sebesar Rp98 triliun per tahun pada tahun 2025-2029 dan mencapai rata-rata sebesar Rp471 triliun per tahun pada tahun 2041-2045. Kebutuhan investasi tersebut kemudian dirinci berdasarkan kawasan, di mana pada tahun 2026-2030, target rata-rata kebutuhan investasi terbesar terdapat di Batam yaitu sebesar Rp115 triliun diikuti secara berurutan oleh Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Adapun pada tahun 2041-2045, target rata-rata kebutuhan investasi tahunan di Batam sebesar Rp303 triliun, Bintan sebesar Rp58 triliun, Karimun sebesar Rp23 triliun, dan Tanjungpinang sebesar Rp37 triliun.



**Gambar 1.3 Target Investasi di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun 2021-2045**

*Sumber: Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024*

Target rata-rata kebutuhan investasi tahunan Kawasan BBK tahun 2026-2030 sebesar Rp156 triliun pada prinsipnya tidak hanya berasal dari kebutuhan investasi baru, melainkan juga berasal dari pengembangan investasi yang telah ada.



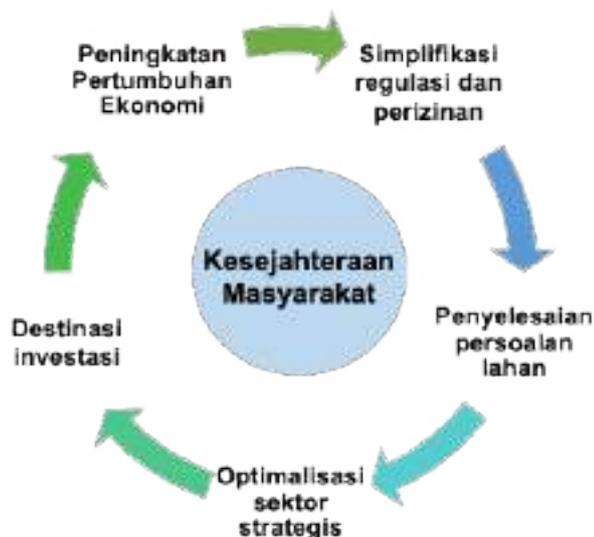
**Gambar 1.4 Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Badan Pengusahaan (BP) Batam di Istana Merdeka**

*Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025.*

Mengacu pada arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 13 Maret 2025 dan 22 Mei 2025 di Istana Negara Jakarta agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga kesejahteraan Masyarakat dapat digesa untuk meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal tersebut sejalan dengan upaya Batam dalam meningkatkan realisasi investasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10 persen pada

tahun 2029. Adapun arahan bapak presiden kepada BP Batam adalah sebagai berikut:

9. Mempercepat simplifikasi perizinan yang transparan dan akuntabel;
10. Melakukan penyelarasan terhadap berbagai regulasi yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan investasi;
11. Selesaikan persoalan kepemilikan lahan non produktif;
12. Mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang dengan tetap menjaga iklim investasi;
13. Optimalisasi sektor strategis seperti Kawasan Industri, galangan kapal, logistik untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional;
14. Jadikan Batam menarik sebagai destinasi investasi;
15. Kembangkan Batam menjadi kota yang indah, nyaman & menarik bagi penduduk serta pekerja; dan
16. Pengelolaan investasi Batam bisa memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan Masyarakat.

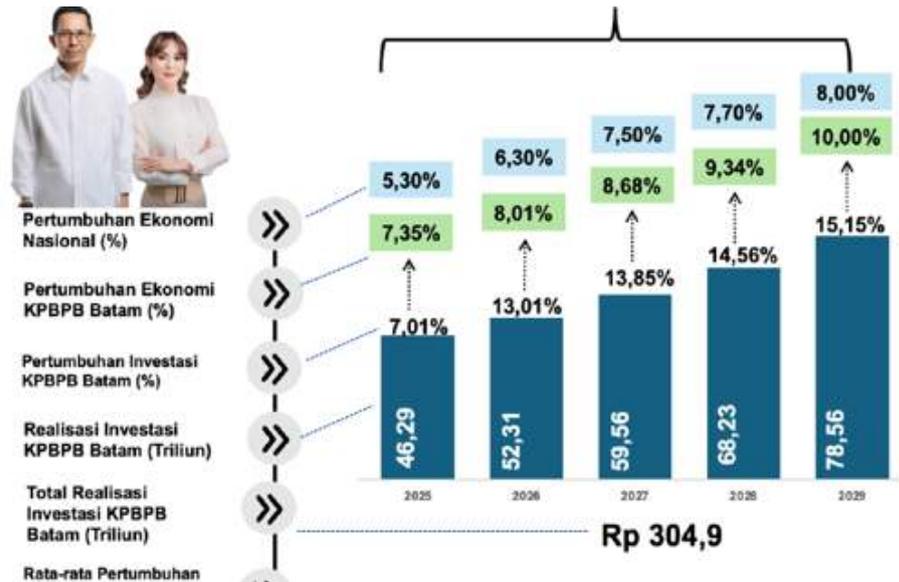


**Gambar 1.5 Siklus Kesejahteraan Masyarakat dan Investor**

*Sumber: Pusrenpros, 2025*

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan dukungan investasi yang signifikan selama periode lima tahun ke depan. Total investasi yang dibutuhkan di Batam pada tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai Rp304,9 triliun. Investasi ini akan tumbuh secara bertahap, dimulai dari 46,29 triliun rupiah pada

tahun 2025, meningkat menjadi 52,31 triliun rupiah pada tahun 2026, 59,56 triliun rupiah pada tahun 2027, 68,23 triliun rupiah pada tahun 2028, dan 78,56 triliun rupiah pada tahun 2029. Dengan asumsi pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 12,71 persen per tahun, diharapkan peningkatan investasi ini akan mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Batam, sehingga target pertumbuhan sebesar 10 persen pada tahun 2029 dapat tercapai.



**Gambar 1.6 Target Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi KPBPB Batam**

*Sumber: Deputi/Bidang Investasi dan Pengusahaan, 2025*

Target ini menunjukkan komitmen kuat KPBPB Batam dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, serta memastikan bahwa Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1 Potensi

#### Potensi Kawasan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BP Batam memiliki beberapa potensi yang dapat memperkuat pelaksanaan fungsinya sebagai pengelola kawasan, antara lain:

1. *Batam is like heaven grafted by God on earth*, lokasi geografis yang dianugerahi dengan aksesibilitas yang sangat mudah ke negara lainnya di belahan dunia menjadi pintu masuknya investasi dan perdagangan dari luar negeri, karena berada di jalur perdagangan selat malaka yang merupakan jalur tersibuk kedua di dunia. Terdapat hampir 100.000 kapal yang melintasi selat malaka setiap tahunnya membawa  $\frac{1}{4}$  dari barang yang diperdagangkan di dunia atau dengan kapasitas mencapai 70 juta TEUs. Berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, menciptakan peluang bagi investor dan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di berbagai sektor, seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan. Dengan demikian, Batam memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, yang didorong oleh dinamika Selat Malaka sebagai jalur pelayaran dan logistik dunia.
2. Insentif KPBPB dan KEK. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) dirancang untuk menarik investasi dan perdagangan internasional melalui serangkaian insentif fiskal. Kebijakan ini meliputi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk transaksi barang di dalam kawasan. Selain itu, KPBPB memberlakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 70 negara mitra. Implementasi P3B bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama, baik di Indonesia maupun di negara domisili investor. Insentif ini berkontribusi pada penurunan biaya produksi dan peningkatan daya saing produk di pasar global. Sementara itu, dalam skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Batam memberikan insentif tambahan yang lebih agresif untuk menarik investasi besar dan sektor strategis. Di antaranya adalah fasilitas *tax holiday*, yaitu pembebasan Pajak Penghasilan Badan hingga 20 tahun untuk investasi minimal Rp1

triliun, serta pembebasan bea masuk dan pajak ekspor-impor untuk barang modal dan bahan baku.

3. **Infrastruktur yang handal.** KPBPB dirancang dengan penekanan pada penyediaan infrastruktur berkualitas tinggi untuk mendukung kegiatan investasi. Jaringan jalan yang luas dan terpelihara dengan baik menghubungkan Bandara Internasional Hang Nadim dengan Pelabuhan Terminal Batu Ampar, dan berbagai kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi logistik dan memfasilitasi pergerakan barang dan tenaga kerja. Selain itu, KPBPB Batam menjamin pasokan utilitas esensial, termasuk air bersih dan listrik dengan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional industri. Ketersediaan infrastruktur yang handal ini merupakan faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan tersebut.
4. **Pengembangan Rempang-Galang.** Pemerintah telah menetapkan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di KPBPB Batam yaitu i) PSN Rempang Eco City (REC) dan ii) PSN Kawasan Industri Wiraraja-GESEIP. Pulau-pulau ini menawarkan lahan yang luas dan belum termanfaatkan, menyediakan ruang bagi pertumbuhan industri dan investasi di masa depan. Pengembangan Rempang-Galang diproyeksikan akan menampung berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, logistik, hingga pariwisata. Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas industri KPBPB Batam secara signifikan, menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.
5. **Kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025.** Dalam Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengelola KPBPB. Salah satu kewenangan utama adalah menerbitkan perizinan berusaha.

Terdapat 69 jenis perizinan berusaha yang dikelola oleh BP Batam, diklasifikasikan ke dalam 8 kelompok sektor usaha yang mencakup berbagai bidang mulai dari perdagangan, perindustrian, kepariwisataan, hingga infrastruktur. Kewenangan perizinan yang terpusat di BP Batam ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan efisiensi bagi investor. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha dan menarik lebih banyak investasi masuk ke KPBPB Batam.

6. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset BP Batam. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, BP Batam aktif menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset strategis seperti bandara, pelabuhan, dan air minum. Kerjasama ini mencakup pengembangan terminal baru di bandara, modernisasi fasilitas pelabuhan dan pengembangan kawasan terminal *ferry* internasional, dan pengoptimalan sistem distribusi air minum. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar arus logistik, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kerjasama ini, BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di KPBPB Batam.
7. Kawasan Industri Terpadu. Dengan 31 kawasan industri yang tersebar di Batam, pengelolaan kawasan menjadi lebih rapi dan tertata. Saat ini terdapat 2 kawasan industri terbesar di Batam yaitu i) Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE) dengan luas area 540 Ha yang fokus melayani industri minyak dan gas, energi, pergerakan kargo berat dan ukuran besar, dan ii) Batamindo Industrial Estate (BIE) dengan luas area 320 Ha yang fokus melayani industri manufaktur elektronika, semikonduktor, peralatan listrik, alat komunikasi, dan alat kesehatan. Pengelolaan yang terpadu ini menciptakan lingkungan industri yang efisien, aman, dan berkelanjutan, dengan infrastruktur yang terintegrasi, utilitas yang

handal, dan kemudahan akses bagi investor. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan mendorong pertumbuhan investasi. Keberadaan kawasan industri terpadu ini merupakan salah satu daya tarik utama KPBPB Batam bagi investor baik domestik maupun asing.

8. Relokasi perusahaan akibat tarif AS terhadap China. Peningkatan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap barang-barang dari China telah menciptakan peluang bagi Batam untuk menjadi tujuan relokasi perusahaan. Selain insentif fiskal yang menarik, Batam juga menawarkan infrastruktur yang handal, biaya produksi yang kompetitif, dan tenaga kerja yang terampil, sehingga menjadi destinasi yang menguntungkan bagi perusahaan China yang ingin memperluas pasar global dan meningkatkan daya saing. Beberapa perusahaan China di sektor elektronik dan manufaktur telah menunjukkan minat untuk merelokasi pabrik mereka ke Batam. Relokasi ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi di KPBPB.
9. Munculnya sektor ekonomi baru seperti Industri Hijau dan ICT. KPBPB Batam memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh kemunculan sektor-sektor ekonomi baru, seperti industri hijau dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Beberapa perusahaan telah melakukan investasi strategis dalam pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor-sektor ini melalui berbagai insentif dan kebijakan yang mendukung. Transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis inovasi diharapkan dapat memperkuat posisi KPBPB Batam dalam persaingan ekonomi global.

## Kelembagaan BP Batam

Beberapa potensi dalam Kelembagaan BP Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU.** Sebagai BLU, BP Batam memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada BP Batam termasuk dalam hal penggunaan pendapatan dan penetapan tarif layanan. Hal ini memungkinkan BP Batam untuk merespon kebutuhan pelayanan dengan cepat, menawarkan tarif layanan yang kompetitif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. BP Batam juga dapat secara fleksibel mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur pendukung investasi, promosi dalam rangka menarik investor, dan melaksanakan program-program lainnya berdasarkan fungsi KPBPB.
2. **Bagian dari Rencana Pengembangan sesuai Rencana Induk (Rinduk) BBK.** Sebagai entitas yang terintegrasi dalam kerangka Rinduk BBK, BP Batam memiliki panduan strategis yang komprehensif dalam mengelola dan mengembangkan KPBPB. Rinduk BBK mengidentifikasi enam sektor ekonomi utama sebagai fokus pengembangan: Hub Logistik Internasional, Kedirgantaraan, Industri Ringan dan Bernilai Tinggi, Industri Digital dan Kreatif, Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional, serta Pariwisata Kesehatan Terintegrasi. BP Batam secara aktif memfasilitasi pertumbuhan sektor-sektor ini melalui penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal, pengembangan infrastruktur pendukung, dan optimalisasi proses perizinan. Strategi ini diproyeksikan akan meningkatkan daya saing KPBPB, menarik investasi asing, dan menghasilkan dampak *multiplier* yang signifikan bagi perekonomian regional.

### 1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi BP Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

#### **Permasalahan dalam pengembangan kawasan strategis**

1. Ketersediaan lahan untuk investasi di Batam semakin terbatas, terutama di kawasan hutan, perairan, dan area dengan keberadaan bangunan liar/ tanpa izin. Kawasan hutan lindung memiliki regulasi ketat yang membatasi pengembangan industri, sementara kawasan perairan memerlukan reklamasi yang membutuhkan biaya besar dan studi dampak lingkungan yang komprehensif. Keberadaan rumah liar juga menimbulkan permasalahan sosial dan legalitas lahan, yang menghambat pengembangan investasi. Hal ini dapat mengurangi daya tarik Batam bagi investor yang membutuhkan lahan luas, mengurangi potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi baru, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi PP 41/2021, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan kementerian sektoral, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut). Hal ini terlihat dalam proses perizinan pemanfaatan ruang laut dan kawasan hutan untuk kegiatan investasi, di mana terdapat perbedaan interpretasi dan prosedur antara BP Batam dan kementerian terkait. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, menghambat proses perizinan, dan berpotensi mengurangi minat investasi di KPBPB.
3. Ketersediaan sumber air baku menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan di Batam. Proyeksi kebutuhan air untuk Data Center Nongsa, Industri Solar Panel, dan Industri di Bandara menunjukkan bahwa Batam akan menghadapi defisit air pada tahun 2030. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air baku di Batam, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, industri, dan proyeksi-

proyek strategis tersebut, diperkirakan akan terjadi defisit air. Defisit air ini dapat mengganggu aktivitas industri, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

4. KPBPB Batam menghadapi persaingan ketat dari kawasan industri di luar negeri, seperti China, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia, yang menawarkan upah buruh yang lebih murah. Kawasan industri di negara-negara tersebut menawarkan berbagai insentif, seperti tax holiday, kemudahan perizinan, dan biaya produksi yang lebih rendah. Persaingan ini dapat mengurangi daya tarik Batam bagi investor asing, menghambat pertumbuhan investasi, mengurangi laju ekspansi industri, dan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.
5. Posisi Singapura sebagai investor asing terbesar di Batam (61% pada tahun 2024) menciptakan ketergantungan yang signifikan. Perubahan dinamika ekonomi Singapura, seperti resesi atau perubahan fokus investasi, dapat berdampak signifikan terhadap Batam. Penurunan investasi Singapura dapat memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa di Batam, mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada Singapura dan meningkatkan ketahanan ekonomi Batam.

#### **Permasalahan dalam pengelolaan dukungan manajemen BP Batam**

1. Keterbatasan kapasitas fiskal BP Batam menjadi kendala signifikan dalam upaya pengembangan infrastruktur di KPBPB. Dengan anggaran sumber pendanaan PNBPN untuk belanja modal infrastruktur di bawah 1 triliun rupiah per tahun, BP Batam menghadapi tantangan dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur baru yang esensial, seperti perluasan jaringan jalan, peningkatan kapasitas pelabuhan, dan modernisasi sistem utilitas.

Akibatnya, daya saing KPBPB dapat tergerus dibandingkan kawasan industri lain yang memiliki infrastruktur lebih modern dan efisien.

2. Ketidakjelasan bentuk kelembagaan BP Batam, apakah sebagai Kementerian/Lembaga atau Badan Layanan Umum, menimbulkan berbagai permasalahan internal yang mempengaruhi efektivitas kinerja dan profesionalisme SDM. Status kepegawaian pegawai tetap di BP Batam belum jelas, menciptakan ketidakpastian dan berpotensi menghambat pengembangan karir. Tidak adanya penambahan pegawai tetap selama kurang lebih 8 tahun, dengan hanya mengandalkan PKWT dan PPK, menimbulkan kekurangan SDM yang berpengalaman dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ketidakjelasan jenjang karir juga mengurangi motivasi dan loyalitas pegawai. Pemerintah perlu segera menetapkan bentuk kelembagaan BP Batam yang definitif agar status kepegawaian menjadi jelas, proses rekrutmen dan pengembangan SDM dapat dioptimalkan, serta tercipta sistem karir yang transparan dan adil. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme SDM, efisiensi birokrasi, dan pada akhirnya mendukung pengembangan KPBPB yang lebih optimal.

### **1.2.3 Analisis SWOT**

Analisis SWOT ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh BP Batam. Dalam konteks ini, analisis tersebut akan memberikan gambaran tentang kekuatan yang dimiliki BP Batam dan akan menyoroti kelemahan yang mungkin menghambat pertumbuhan jangka panjang. Melalui analisis ini, kami juga akan mengidentifikasi peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini, BP Batam dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan.

I N T E R N A S I O N A L	<b>STRENGTHS</b>	<b>WEAKNESSES</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi geografis yang strategis</li> <li>▪ Insentif KPBPB</li> <li>▪ Infrastruktur yang handal</li> <li>▪ Pengembangan Rempang-Galang</li> <li>▪ Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU</li> <li>▪ Kewenangan sesuai PP 41/2021</li> <li>▪ Kerjasama dengan pihak Swasta dalam pengelolaan aset di BP Batam (Bandara, Pelabuhan, dan Air Minum)</li> <li>Memiliki kawasan industri terpadu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan lahan yang terbatas untuk pengembangan dimasa depan</li> <li>▪ Sumber air baku yang terbatas</li> <li>▪ Keterbatasan kapasitas fiskal pembangunan infrastruktur BP Batam</li> </ul>
E K S T R E N A S I S	<b>+</b>	<b>-</b>
	<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>THREATS</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potensi Selat Malaka sebagai alur pelayaran dan logistik dunia.</li> <li>▪ Relokasi perusahaan akibat tarif AS terhadap China</li> <li>▪ Bagian dari Rencana Pengembangan sesuai Rinduk BBK</li> <li>▪ Munculnya sektor ekonomi baru seperti Industri Hijau dan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompetisi dari Kawasan industri lainnya</li> <li>▪ Perubahan dinamika ekonomi Singapura</li> <li>▪ Hambatan perdagangan yang menahan perkembangan ekonomi</li> </ul>

**Tabel 1.2 Analisis SWOT**

Sumber: Pusrenpros, 2025

KPBPB Batam memiliki sejumlah kekuatan strategis (*strengths*) yang menjadikannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Lokasinya yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional, ditambah dengan infrastruktur yang handal dan dukungan kebijakan insentif dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), memberikan nilai tambah yang besar bagi investor. Selain itu, pengembangan kawasan Rempang-Galang serta fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU) dan kewenangan penuh yang diberikan melalui PP 41/2021 Jo. PP 25/2025 semakin memperkuat otonomi dan daya tarik Batam. Kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset vital seperti bandara, pelabuhan, dan air minum juga menjadi penopang utama dalam pembangunan kawasan industri yang terintegrasi.

Namun demikian, Batam masih menghadapi sejumlah kelemahan (*weaknesses*) internal yang perlu segera diatasi. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pengembangan masa depan menjadi tantangan utama, terlebih jika permintaan investasi terus meningkat.

Selain itu, sumber air baku yang terbatas serta ketergantungan pada kapasitas fiskal Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan kawasan.

Dari sisi eksternal, Batam memiliki berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat dimaksimalkan. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia menjadikan kawasan ini sangat ideal sebagai hub logistik dan pelayaran internasional. Situasi geopolitik seperti relokasi industri akibat tarif AS terhadap China membuka peluang baru bagi Batam sebagai alternatif tujuan investasi. Kawasan ini juga termasuk dalam Rencana Pengembangan strategis wilayah BBK, dan menunjukkan potensi besar dalam sektor-sektor baru seperti industri hijau, teknologi informasi, dan komunikasi.

Di sisi lain, Batam tidak luput dari ancaman (*threats*) eksternal yang dapat menghambat kemajuan. Persaingan dengan kawasan industri lain di dalam dan luar negeri semakin ketat, termasuk dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Perubahan dinamika ekonomi regional, khususnya di Singapura, serta hambatan perdagangan global juga dapat mempengaruhi kelangsungan investasi dan ekspor-impor dari kawasan ini.

Melalui pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal secara optimal, serta mitigasi terhadap kelemahan dan ancaman yang ada, Batam memiliki prospek yang kuat untuk terus berkembang sebagai kawasan industri, logistik, dan teknologi berkelas dunia.



# **BAB 2**

## **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

<b>Visi</b>	<b>31</b>
<b>Misi</b>	<b>31</b>
<b>Tujuan</b>	<b>32</b>
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>32</b>
<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>32</b>
<b>Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program</b>	<b>36</b>

## 2.1 Visi

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan, serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2025-2029 atau dalam 5 tahun ke depan ditetapkan Visi BP Batam yaitu:

**“Kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**

Adapun visi di atas memiliki arti:

1. BP Batam berperan aktif dalam menarik investasi luar dan dalam negeri pada sektor prioritas untuk mendukung keunggulan dan daya saing dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional;
2. Maju berarti berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing tinggi di kancah domestik dan global;
3. Berkelanjutan berarti lestari dan seimbang antara pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan;
4. BP Batam mendorong peningkatan kinerja kelembagaan agar menjadi institusi yang kredibel dalam pengelolaan KPBPB guna mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

## 2.2 Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka BP Batam menyelaraskan misinya sebagai berikut:

<b>MISI 1</b>	<b>Menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan investasi bernilai tinggi</b>
<b>MISI 2</b>	<b>Meningkatkan kinerja kelembagaan BP Batam yang efektif dan efisien</b>

### 2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BP Batam menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

<b>TUJUAN 1</b>	<b>KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.</b>
<b>TUJUAN 2</b>	<b>Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel.</b>

Adapun untuk Tujuan 1, akan diukur melalui indikator Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam, sedangkan Tujuan 2 diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

### 2.4 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan BP Batam di tahun 2025-2029, maka ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>	<b>Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam</b>
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel</b>

### 2.5 Indikator Sasaran Strategis dan Indikasi Risiko

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dari BP Batam di tahun 2025-2029, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja BP Batam untuk lima tahun ke depan. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2025, yang mengamanatkan pengikutsertaan Manajemen Risiko dalam penyusunan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka pada Sasaran Strategis BP Batam disertakan juga indikasi risiko, perlakuan risiko, dan penanggung jawab perlakuan risiko, yaitu:

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>		
<b>Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam</b>		
<b>IKSS-1 Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam</b>		
<p>Nilai realisasi investasi merupakan jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KPBPB Batam berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan alat ukur utama dalam menilai keberhasilan BP Batam dalam mengelola kawasan KPBPB. Pengukuran indikator ini bertujuan memacu BP Batam dalam mengembangkan KPBPB Batam menjadi kawasan tujuan investasi di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa segala kegiatan pengembangan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan memberikan hasil dan manfaat sehingga menarik para pelaku usaha untuk menanamkan dan/atau menambahkan modalnya di KPBPB Batam</p> <p><b>Diukur dengan melihat:</b></p> <p>Besaran nilai realisasi investasi yang berasal dari luar negeri (PMA) dan dari dalam negeri (PMDN) setiap tahun selama lima tahun.</p>		
<b>Manajemen Risiko Sasaran Strategis 1</b>		
<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Perlakuan Risiko</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1. Tidak tercapainya realisasi investasi akibat volatilitas ekonomi global	a. Perkuatan promosi langsung dan terarah	1.Dit. Investasi
	b. Perkuatan kesepakatan dengan negara atau pengelola kawasan ekonomi regional	1.Dit. Investasi 2.Dit. Pengembangan KPBPB & KEK 3.Dit. Pengendalian usaha
2. Ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia	Perkuatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV)	1.Dit. Investasi 2.Dit. Pengembangan KPBPB & KEK 3.Dit. Pengendalian Perusahaan
3. Ketersediaan lahan yang terbatas untuk investasi	Perluasan area untuk pengembangan kawasan investasi baru	1.Dit. Pengelolaan Lahan 2.Dit. Pengelolaan Lahan, Pesisir & Reklamasi 3.Dit. Pengendalian Lahan, Pesisir & Reklamasi
4. Kurangnya infrastruktur pendukung investasi	Pembangunan infrastruktur pendukung investasi yang modern dan berkelanjutan	1.Dit. Pembangunan Infrastruktur 2.Dit. Perencanaan Infrastruktur 3.Dit. Pengamanan Aset dan Kawasan

## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam

#### **IKSS-2 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Umum dan Kawasan**

Dalam memberikan pelayanan publik kepada pengguna layanan, BP Batam diharapkan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna layanan. Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### **Diukur dengan melihat:**

Indeks kepuasan masyarakat yang didapatkan dari hasil survei kepada pelanggan pengguna jasa pelayanan yang diukur dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

- Persyaratan pelayanan;
- Prosedur pelayanan;
- Waktu pelayanan;
- Biaya/tarif;
- Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- Kompetensi pelaksana;
- Perilaku pelaksana;
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan
- Sarana dan prasarana.

#### **IKSS-3 Nilai Realisasi PNB BP Batam**

Nilai realisasi PNB merupakan pendapatan yang diperoleh dari badan dan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh BP Batam, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain. Indikator ini bertujuan untuk memacu BP

Batam agar dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber pendapatan. Penggunaan PNBPN ini untuk membiayai seluruh operasional BP Batam, dan juga membiayai pembangunan dan peningkatan fasilitas prasarana dan sarana di KPBPB Batam.

**Diukur dengan melihat:**

Jumlah pendapatan dari seluruh layanan di BP Batam meliputi Uang Wajib Tahunan dari Lahan, serta pendapatan Badan Usaha di BP Batam yang diperoleh setiap tahun selama lima tahun.

**Manajemen Risiko Sasaran Strategis 2**

Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
Keterbatasan kapasitas fiskal untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung layanan BP Batam	Optimalisasi pengembangan melalui pendanaan Non PNBPN-BLU	1. Dit. Kepelabuhanan 2. Dit. Pengelolaan Kawasan Bandara 3. Badan Usaha Spam Fasling 4. Badan Usaha Rumah Sakit

**SASARAN STRATEGIS 3**

**Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel**

**IKSS-4 Indeks Reformasi Birokrasi**

Tujuan dari Reformasi Birokrasi menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mengukur tercapainya tujuan RB menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

**Diukur dengan melihat:**

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) diukur melalui indikator-indikator yang mewakili program-program dan sasaran reformasi birokrasi. Indikator-indikator tersebut meliputi:

- Meningkatnya kapasitas APIP,
- Meningkatnya integritas aparatur,
- Efisiensi penyelenggaraan,

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan</li> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> </ul>		
<b>Manajemen Risiko Sasaran Strategis 3</b>		
<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Perlakuan Risiko</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Terkendalanya implementasi reformasi birokrasi akibat kurangnya komitmen dan adanya resistensi terhadap perubahan	Implementasi sistem merit dalam pengelolaan organisasi yang akuntabel	1. Biro SDM 2. Dit. OKMR 3. Biro Keuangan 4. Satuan Pemeriksaan Internal 5. Biro Hukum 6. Biro Umum.
	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. PDSI 2. Pusat Perencanaan Program Strategis 3. Pusat Harmonisasi Kebijakan 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## 2.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mencapai 3 (tiga) sasaran strategis di atas, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 7 (tujuh) Sasaran Program di lingkungan Badan Pengusahaan Batam sebagaimana berikut:

No	Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)		Koordinator Program
1	Program Pengembangan Kawasan Strategis	SP 1	Meningkatnya efektivitas promosi dan kualitas realisasi investasi	IKP 1	Jumlah Minat Investasi	Anggota Bidang Investasi dan Pengusahaan
				IKP 2	Nilai realisasi investasi	
		SP 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam	IKP 3	Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi	Anggota Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi.
				IKP 4	Persentase keberhasilan pengawasan dan pengendalian lahan, pesisir, dan reklamasi	
		SP 3	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	IKP 5	Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi	Anggota Bidang Infrastruktur
				IKP 6	Persentase keberhasilan pengamanan	

					lingkungan, hutan, aset, dan objek vital	
		SP 4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam	IKP 7	Rata-rata IKM pengguna layanan BU	Anggota Bidang Pelayanan Umum
				IKP 8	Realisasi PNBPU	
		SP 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	IKP 9	Rata-rata IKM pengguna layanan Bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang	Anggota Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang
				IKP 10	Realisasi PNBPU Kawasan Bandara dan Pelabuhan	
2	Program Dukungan Manajemen	SP 6	Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	IKP 11	Indeks Perencanaan Pembangunan	Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan
				IKP 12	Indeks Indeks kualitas kebijakan	
				IKP 13	Indeks SPBE	
				IKP 14	IKM pengguna layanan PTSP	
		SP 7	Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	IKP 15	Indeks Reformasi Birokrasi	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan
				IKP 16	Indeks Sistem Merit	
				IKP 17	Indeks Maturitas SPIP	
				IKP 18	Opini BPK	

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikatornya serta Identifikasi Risiko Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:





# **BAB 3**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

<b>Arah Kebijakan dan Strategi Nasional</b>	<b>40</b>
<b>Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam</b>	<b>50</b>
<b>Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis</b>	<b>54</b>
<b>Wilayah Penataan dan Pengembangan</b>	<b>54</b>
<b>Proyek Strategis Nasional</b>	<b>56</b>
<b>Sektor Prioritas Pengembangan Infrastruktur</b>	<b>59</b>
<b>Kerangka Regulasi</b>	<b>73</b>
<b>Kerangka Kelembagaan</b>	<b>75</b>

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

#### 3.1.1 Arah Kebijakan RPJPN dan RPJMN

Cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tercermin dalam RPJPN 2025-2045 yang secara menyeluruh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

RPJPN 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Agenda Pembangunan yang selanjutnya diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) Arah (tujuan) Pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan. Lebih lanjut terdapat 5 (lima) sasaran visi RPJPN yang terdiri dari: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.



Gambar 3.1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

Pentahapan pembangunan jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Indonesia emas 2045 yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 3.2 Tahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045**

*Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga pencapaian target pada RPJMN ini menjadi titik awal serta penentu keberhasilan pencapaian target RPJPN. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 melalui Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yaitu:

**“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara Maju di tahun 2045.

Visi tersebut akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita atau menjadi Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029, yaitu:



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029



**Gambar 3.3 Asta Cita dan Prioritas Nasional 2025-2029**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

Selanjutnya Asta Cita akan didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program *Quick Wins*, dan 320 Program Kerja, adapun 17 Program Prioritas yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan. Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada capaian Sasaran Pembangunan Nasional sebagai berikut:



**Gambar 3.4 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029**

*Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025*

Terdapat 8 program hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) dalam RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang

membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Berikut visual visi, misi, program prioritas, program hasil terbaik cepat, dan program kerja Pembangunan RPJMN 2025-2029:



**Gambar 3.5** Visi Misi, Program Prioritas Presiden dalam RPJMN

*Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025*

Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, BP Batam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 yaitu “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi”. Visualisasi prioritas nasional, program prioritas nasional, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BP Batam sebagai berikut:



**Gambar 3.6 Prioritas Nasional 3**

*Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)*

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN utamanya terkait arah pembangunan wilayah Sumatera yang memiliki tema “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan” dan sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di KPBPB Batam telah ditetapkan lokasi prioritas dan *highlight* indikasi intervensi pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam melalui penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang terintegrasi.
2. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terintegrasi Jalan Tol Batam-Bintan.
3. Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun (sektor industri prioritas: semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal).
4. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil.
5. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjung Pinggir-Jodoh.
6. Pengembangan Kawasan Terpadu *Rempang Ecocity*.
7. Pengembangan Kawasan Terpadu Galang *Maritime City*.

8. Pengembangan KEK Batam *Aero Technic*, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh.
9. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas.
10. Pembangunan *Closing Dam Piayu*.
11. Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru.
12. Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering-Batam Center.
13. Pengembangan SPAM Regional Batam.
14. Pengembangan *Batam Urban dan Industrial Sewerage System Development Project*.
15. Perencanaan, persiapan, dan Pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Ugang, yang terintegrasi dengan TOD.
16. Pembangunan TPST Regional Batam.
17. Pengembangan kawasan pariwisata Batam (Pengembangan Kawasan MICE dan *Urban Tourism* Batam Center).
18. Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang.
19. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi.
20. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

### **3.1.2 Arah Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun**

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK) secara geostrategis merupakan suatu kawasan yang berada di Selat Malaka sebagai jalur logistik dan perdagangan internasional sekaligus jalur utama untuk masuknya investasi, barang, dan jasa serta pusat pertumbuhan dan penyaluran barang ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, pada masa yang akan datang Kawasan BBK ini juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan industri yang *high and valuable technology* dengan penciptaan nilai tambah tinggi. Hal inilah yang membuat Kawasan BBK dinilai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang

strategis dan menjanjikan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional. Untuk itu ditetapkan Visi Pengembangan Kawasan BBK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun adalah **“Kawasan BBK sebagai hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing”**.



**Gambar 3.7 Visi Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024



**Gambar 3.8 Tahapan Pengembangan Sektor Industri Utama**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Dalam Rinduk BBK juga telah menerjemahkan visinya kedalam pengembangan sektor industri utama yang dikembangkan di masing-masing wilayah dimana pada wilayah Batam sektor pengembangan industri utamanya adalah:

## **1. Industri Hub Logistik Internasional**

Kawasan Batam memiliki posisi geostrategis yang baik dalam konteks nasional maupun internasional. Terletak di perairan Selat Malaka, Kawasan Batam akan dikembangkan sebagai Hub Logistik Internasional yang memiliki peran strategis dalam perdagangan dan rantai suplai global. Salah satu pendekatan dalam pengembangan bisnis unggulan di Kawasan Batam adalah dengan mengembangkan Batam sebagai kawasan logistik. Kawasan tersebut akan berperan sebagai penghantar barang masuk dan keluar yang diperlukan bagi kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata. Untuk barang yang bervolume besar dan berat akan memanfaatkan pelabuhan laut, sedangkan untuk barang yang ringan dan bernilai tinggi dan penghantaran cepat akan memanfaatkan bandara internasional.

## **2. Industri Kedirgantaraan**

Industri kedirgantaraan, termasuk industri MRO, merupakan sektor yang saat ini berkembang pesat di dunia. Perkembangan pasar MRO diproyeksikan terus tumbuh di beberapa bagian negara, salah satunya Asia Pasifik. Kondisi ini akan memberikan peluang bagi industri kedirgantaraan di Indonesia.

## **3. Industri Ringan dan Bernilai (Optoelektronik, Peralatan Rumah Tangga)**

Industri ringan dan bernilai merupakan industri yang dianggap paling sesuai untuk dikembangkan di Kawasan Batam. Industri ini membutuhkan lebih sedikit bahan mentah, ruang, dan tenaga. Jenis industri ringan dan bernilai yang akan dikembangkan di Kawasan Batam di antaranya adalah **optoelektronik**. Industri ini berkembang sangat pesat terutama pada sebagian barang elektronik menggunakan optoelektronik sebagai material utamanya. Industri optoelektronik mengalami peningkatan permintaan yang besar di skala global di mana saat ini elektronik menjadi suatu kebutuhan dan gaya hidup, sehingga permintaannya di pasar diproyeksikan terus meningkat.

## **4. Industri Digital dan Kreatif**

Industri digital dan kreatif merupakan industri yang memiliki potensi sangat tinggi, mengingat kemajuan teknologi dan globalisasi yang membentuk jenis industri baru. Industri kreatif memberikan kontribusi besar terhadap PDB yang

mencapai 1 triliun rupiah. Teknologi yang terus berkembang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Kompetensi teknis seperti pemrograman, data sains, keamanan dunia maya, pengintegrasian sistem, serta desain dan pemodelan animasi menjadi modal utama para pelaku industri kreatif digital.

## **5. Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional**

Kawasan pusat bisnis/ *Central Business District* (CBD) merupakan kawasan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas publik dengan kegiatan keuangan seperti bandara internasional, pariwisata, bisnis, wilayah perkantoran, ritel atau mall, apartemen, kawasan hunian elit, dan hotel bintang enam, serta adanya ruang publik yang memadai dan ramah lingkungan. Salah satu yang akan dikembangkan dalam CBD adalah Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional. Kawasan Batam memungkinkan untuk dikembangkan sebagai Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yang memberikan ruang dan pelayanan berkelas internasional untuk dapat menarik investor dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yang berada dalam CBD menjadi daya tarik tersendiri dengan kelengkapan fasilitasnya yang modern, terintegrasi, dan kegiatan bisnis yang heterogen. Kawasan Batam yang direncanakan sebagai Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yaitu CBD Pantai Barat dan CBD Teluk Tering Batam Center.

## **6. Pariwisata Kesehatan Internasional**

Kawasan Pariwisata menjadi salah satu daya tarik investasi di Kawasan Batam. Kawasan Batam memiliki kelengkapan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kawasan BBK. Sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan berkualitas internasional akan memiliki potensi besar. Rumah Sakit BP Batam dan sekitarnya memiliki keunggulan lokasi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan jasa kesehatan internasional terintegrasi.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam**

Dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional berupa Asta Cita sebagai Prioritas Nasional serta Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah, maka BP Batam akan fokus dalam upaya menjadi kontributor peningkatan ekonomi

nasional. Untuk itu disusun strategi dan arah kebijakan BP Batam dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui peningkatan nilai ekonomi dan investasi serta upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif serta penerapan reformasi birokrasi demi tercapainya profesionalitas dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

### **3.2.1 Arah Kebijakan BP Batam**

Pengelolaan dan pengembangan KPBPB Batam yang dilakukan oleh BP Batam diarahkan tidak hanya difokuskan kepada pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi yang handal akan tetapi menjadi salah satu kontributor pembangunan ekonomi nasional dengan memperhatikan suatu pengembangan wilayah ekonomi dan investasi yang terencana. Oleh karena itu pengelolaan KPBPB Batam perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan ekonomi dan investasi dengan tata kota/kawasan yang berpedoman untuk meningkatkan nilai tambah seluruh sektor yang mengacu pada segala aspek aktivitas ekonomi, investasi, sosial, lingkungan, potensi kewilayahan dan perairan serta daya dukung KPBPB Batam.

Adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan ekonomi melalui fokus pada pemulihan industri, investasi, dan pariwisata.

Arah kebijakan dan strategi BP Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang disusun dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam dalam pengelolaan dan pengembangan KPBPB. BP Batam menetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

#### **1. Meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan.**

Optimalisasi peningkatan investasi bertujuan menjadikan KPBPB Batam sebagai tujuan investasi di Indonesia, sehingga BP Batam mengupayakannya melalui promosi yang terarah dan terukur dengan menyampaikan kemudahan dan kelebihan yang dimiliki KPBPB Batam yang menjadikan magnet investasi yang menarik di Indonesia. Upaya lebih lanjut untuk mendukung hal tersebut di antaranya dilakukan dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur berupa prasarana dan

sarana agar lebih memperlancar konektivitas dan distribusi barang dari pelabuhan/ bandara menuju kawasan industri dan sebaliknya dalam mewujudkan KPBPB Batam sebagai kawasan industri berorientasi ekspor. Sejalan dengan hal tersebut infrastruktur yang dibangun juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu BP Batam juga akan mengupayakan pengembangan kawasan pusat perdagangan, ekosistem bisnis dan industri keuangan pada lokasi yang direncanakan.

## **2. Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.**

Peningkatan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani bertujuan untuk menjadikan BP Batam sebagai organisasi yang kredibel menjalankan fungsinya dalam pengembangan kawasan strategis KPBPB Batam. Adapun hal ini akan dilakukan di antaranya melalui peningkatan kualitas perencanaan yang tetap diawasi hingga tahap implementasi sehingga tercapai pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan hal tersebut BP Batam juga mengupayakan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha di KPBPB Batam serta pengelolaan keuangan BP Batam yang memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Di samping itu arah kebijakan ini juga dicapai melalui peningkatan profesionalitas pegawai BP Batam.

### **3.2.2 Strategi BP Batam**

#### **1. Strategi untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan.**

- a. Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: Hub Logistik Internasional, Kedirgantaraan, Light and Valuable, Digital dan Kreatif, Perdagangan Internasional dan Finance Center, dan Integrated Health Tourism;
- b. Pengembangan kawasan strategis prioritas di Batam dalam kerangka wilayah penataan dan pengembangan (WPP).

- c. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing; dan
- d. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam.

Untuk mewujudkan strategi di atas, BP Batam akan melakukan langkah konkret, di bawah ini:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan berinvestasi di KPBPB Batam;
- b. Mengembangkan kluster – kluster industri ramah lingkungan, terintegrasi dan terkoneksi;
- c. Mengoptimalkan penggunaan lahan yang efektif dan efisien;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung investasi berbasis pengembangan kewilayahan;
- e. Penguatan sistem konektivitas antar kawasan industri; dan
- f. Mewujudkan sistem transportasi masal antar dan intra wilayah.
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan aset di BP Batam untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan;

**2. Strategi untuk Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.**

- a. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan; dan
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

Untuk mewujudkan strategi di atas, BP Batam akan melakukan langkah konkret di bawah ini:

- a. Menyusun dokumen perencanaan berkualitas yang berpedoman pada RPJMN guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI;

- b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah di BP Batam;
- c. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai di BP Batam guna mendukung fungsi pengembangan KPBPB Batam; dan
- d. Pengelolaan keuangan BP Batam yang memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik.

### **3.3 Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis**

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dengan potensi investasi tinggi dalam mendukung pembangunan kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan visi pengembangan Kawasan BBK;
- b. Kesesuaian dengan bisnis unggulan Kawasan BBK;
- c. Memiliki potensi nilai investasi tinggi;
- d. Memiliki potensi ekspor;
- e. Memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cepat tumbuh yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional; dan
- f. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan keunggulan kawasan.

Setelah dilakukan proses identifikasi Kawasan Strategis berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 17 Kawasan Strategis pengembangan KPBPB Batam yang selanjutnya pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2025-2029 dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan yaitu Batam, Rempang, dan Galang dengan fokus wilayah yaitu :

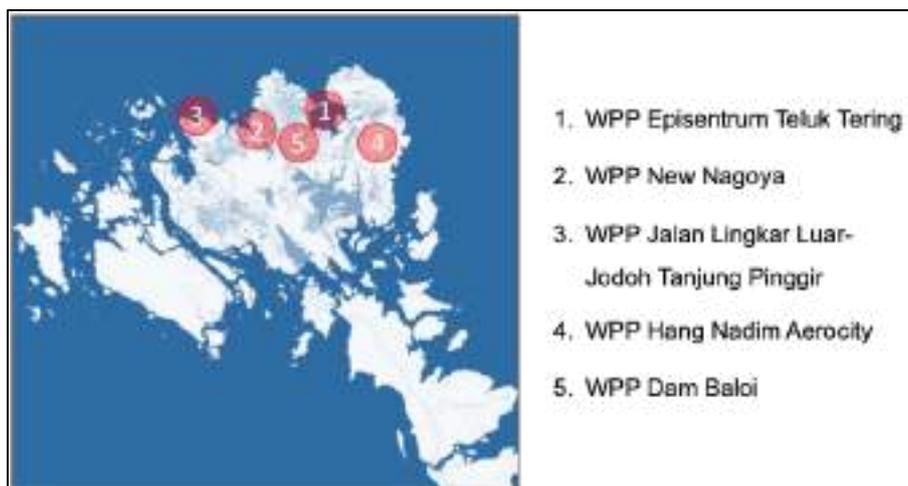
1. Kawasan Pulau Batam, dengan Program Wilayah Penetaan dan Pengabengan (WPP);
2. Kawasan Pulau Rempang, dengan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco City*; dan
3. Kawasan Pulau Galang, dengan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Wiraraja *Green Renewable Energy And Smart-Eco Industrial Park* (GESEIP).

### 3.3.1 Wilayah Penataan dan Pengembangan

Wilayah Penataan dan Pengembangan atau disingkat WPP merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis yang berada di kawasan Pulau Batam di bagian Utara dan menjadi wajah Batam menghadap Singapura dan Johor Malaysia yang sangat potensial untuk dilakukan penataan dan pengembangan agar lebih menarik bagi investor dan wisatawan.

Konsep penataan dan pengembangan kawasan beragam disesuaikan dengan potensi yang ada mulai dari Kawasan Bisnis Terintegrasi atau *Central Business District* (CBD), Pusat Keuangan (*financial centre*), Pusat Transportasi Intra Moda, Komersil, *Heritage*, Pariwisata, *Coastal Area*, Pelabuhan Internasional dan *Cruise*, dan *Aerocity*.

Metodenya menggunakan perencanaan partisipatif dengan melibatkan tim atau tenaga ahli/professional, dunia usaha dan masyarakat sekitar, sementara itu untuk skema pembiayaan menggunakan *Land Value Capture* (LVC), KPBU dan CSR. Adapun WPP terdiri dari 5 (lima) wilayah sebagai berikut:



**Gambar 3.9 Wilayah Penataan dan Pengembangan KPBPB Batam**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

#### 1. WPP Episentrum Teluk Tering

Meliputi 4 (empat) kawasan yaitu:

- Kawasan Reklamasi Teluk Tering;
- Kawasan Bengkong dan Sekitarnya;
- Kawasan Tering Bay dan Sekitarnya; dan

- Kawasan Batam Core.

## **2. WPP New Nagoya**

Meliputi 2 (dua) kawasan yaitu:

- Kawasan Heritage Nagoya; dan
- Kawasan New Nagoya.

## **3. WPP Jalan Lingkar Luar - Jodoh Tanjung Pinggir**

Meliputi 3 (tiga) kawasan yaitu:

- Kawasan Jodoh - Harbour Bay; dan
- Jalan Lingkar Luar
- Pelabuhan Sekupang

## **4. WPP Hang Nadim Aerocity**

Meliputi Kawasan Operasional Bandara

## **5. WPP Dam Balo**

### **3.3.2 Proyek Strategis Nasional (PSN)**

Proyek Strategis Nasional (PSN) termuat dalam RPJMN 2025-2029 yang dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN khususnya Program Prioritas Presiden.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional ditetapkan setiap tahunnya melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.

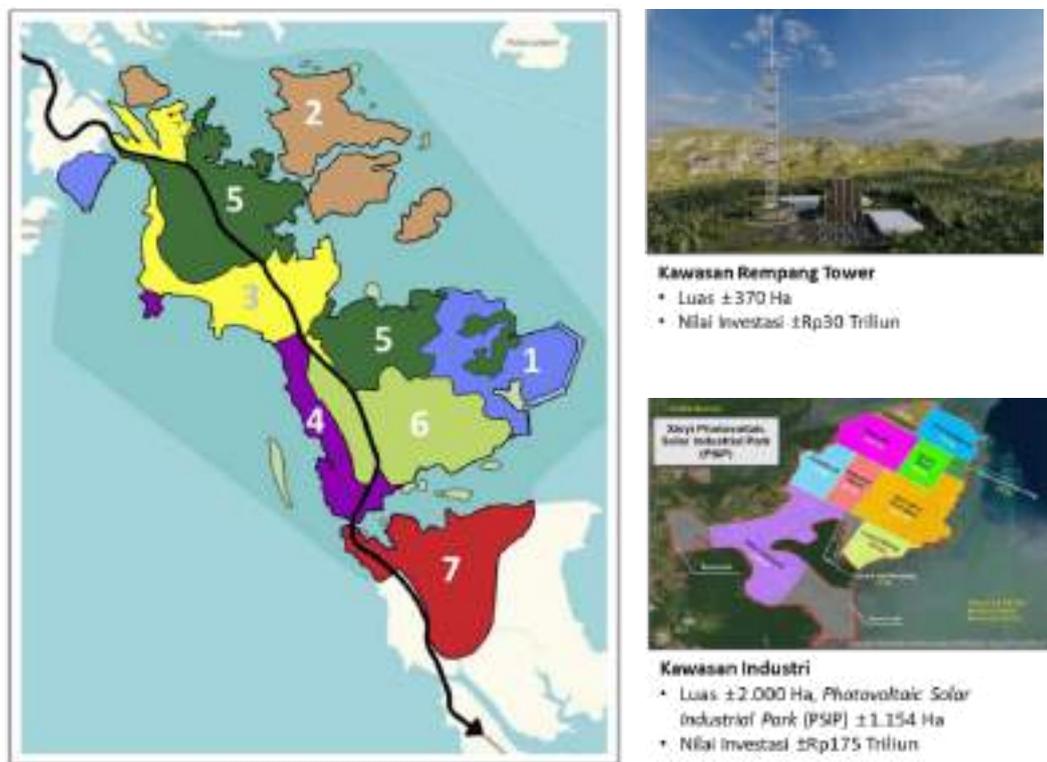
Berdasarkan hal tersebut, saat ini terdapat 2 (dua) Proyek Strategis Nasional (PSN) di KPBPB Batam yaitu PSN Rempang *Eco City*, dan PSN Kawasan Industri Wiraraja *Green Renewable Energy And Smart-Eco Industrial Park* (GESEIP).

#### **1. PSN Rempang Eco City**

Pulau Rempang dikembangkan sebagai kawasan industri hijau dan ramah lingkungan. Pengembangan kawasan Rempang sebagai *The New Engine of Indonesia's Economic Growth* juga telah ditetapkan oleh

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam acara launching Program Pengembangan Kawasan Rempang pada tanggal 12 April 2023 di Jakarta dengan nama Rempang *Eco-City*, serta ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Program Pengembangan Kawasan Rempang dengan akumulasi nilai investasi jangka panjang sebesar Rp381 Triliun dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 306 ribu orang berasal dari sektor industri, jasa, dan pariwisata. Saat ini PT. Makmur Elok Graha sebagai investor telah menyiapkan Rempang *Eco-City Development Strategy* yang mencakup pengembangan kawasan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residential, dan energi hijau (pembangkit listrik tenaga surya). Pengembangan tersebut akan diawali dengan investasi *Photovoltaic Solar Industrial Park* (PSIP) oleh Xinyi Glass dari China, rencana investasi sampai tahun 2028 dengan nilai sebesar USD11,61 Miliar di lahan seluas 2.000 Ha. Selain itu, direncanakan pula pembangunan Rempang Tower yang akan menjadi pusat bisnis dan jasa, serta destinasi wisata di Kawasan Rempang di lahan seluas 370 Ha.



**Gambar 3.10 Zona Kawasan Rempang**

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

Pengembangan Rempang merupakan pengembangan jangka panjang yang diharapkan akan menghasilkan kawasan ekonomi baru yang mencakup kawasan industri, kawasan pemukiman dan fasilitas publik berstandar internasional, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan sesuai dengan perencanaan kawasan yaitu RTRW, RDTR, dan *Estate Regulation* yang telah dibuat oleh Pemerintah. Pengembangan kawasan dengan konsep industri hijau dan ramah lingkungan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi pemanfaatan sumber daya air dan energi secara efektif dan efisien, pengurangan volume limbah, penerapan sistem transportasi terpadu, dan peningkatan peran masyarakat.

Kawasan industri hijau diharapkan dapat menjadi kawasan yang menerapkan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara masyarakat dan alam. Untuk itu, Pengembangan Kawasan Rempang yang telah ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan dengan konsep *Green and Sustainable City* yang diharapkan dapat menjadi tujuan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam, Provinsi Kepri, dan Nasional.

## **2. PSN Kawasan Industri Wiraraja – GESEIP**

Kawasan Industri Wiraraja *Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park* (GESEIP) dirancang untuk menjadi pusat bagi industri yang berfokus pada produk dan proses yang ramah lingkungan. GESEIP mengusung konsep "*Smart-Eco*", yang mengintegrasikan teknologi canggih dalam pengelolaan kawasan industri. Konsep ini mencakup sistem manajemen energi yang efisien, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi *IoT (Internet of Things)* untuk mendukung operasional industri yang berkelanjutan. Kawasan industri ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dalam rangka mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan Indonesia yaitu paling sedikit sebesar 23% pada tahun 2025.

Pengembangan GESEIP merupakan PSN yang diharapkan mampu menjadi pemicu dalam transisi ekonomi dari kegiatan padat karya dan berproduktivitas rendah ke kegiatan padat keterampilan dan berproduktivitas

tinggi. Area lokasi PSN Kawasan Industri Wiraraja GESEIP akan dibangun diatas lahan seluas 989 Ha. Melalui PSN ini, akan menambah nilai investasi baru sebesar Rp226 triliun yang berasal dari Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) maupun dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari Amerika Serikat, Jerman, Taiwan, dan Singapura. Selain itu, melalui GESEIP juga akan menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 36.150 orang.

Dengan nilai investasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Pulau Galang dan Galang Baru dan secara luas di wilayah Kepulauan Riau, maka sebagai salah satu upaya BP Batam dalam rencana pengembangan Kawasan GESEIP yaitu dengan menyediakan infrastruktur utama untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke pusat-pusat aktivitas ekonomi dan komersial yang ada di sepanjang kawasan. Secara keseluruhan, GESEIP merupakan PSN yang bertujuan untuk menggabungkan pertumbuhan industri dengan prinsip keberlanjutan dan inovasi teknologi, sekaligus menjadi model kawasan industri masa depan di Indonesia.



**Gambar 3.11 Zona Kawasan Galang**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

### 3.4 Sektor Prioritas Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Batam mampu mendorong kemajuan KPBPB Batam ke arah yang lebih baik, bahkan menjadikan prioritas bagi sebuah wilayah yang memiliki potensi ekonomi seperti Batam. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing kawasan. Infrastruktur yang baik juga mampu melancarkan

distribusi dan mobilitas barang, baik pengangkutan bahan mentah maupun barang akhir.

BP Batam memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan infrastruktur KPBPB Batam sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan Batam. Pembangunan infrastruktur berskala internasional seperti Pelabuhan Laut (barang dan penumpang), Bandar Udara, penyedia air bersih, Rumah Sakit, jalan dan drainase, fasilitas lingkungan dan aset-aset produktif BP Batam sehingga diharapkan menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Batam dan merangsang pertumbuhan ekonomi di Batam. Selain itu, dengan pengembangan infrastruktur dan aset-aset yang dimiliki BP Batam, akan mendapatkan timbal balik berupa pendapatan yang didapatkan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun pada tahun 2025-2029, BP Batam akan mengembangkan infrastruktur dan aset dibawah ini:

#### A. Pengembangan Pelabuhan Laut (Batu Ampar)

Batam yang berada di lintasan perniagaan antara Samudera Hindia-Samudera Pasifik dan Benua Utara-Benua Selatan dan memiliki akses hub perdagangan internasional ke Singapura yang berjarak 20 km sehingga Batam memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan kawasan ekonomi lain di Indonesia. Untuk memanfaatkan hal tersebut BP Batam telah memacu pembangunan dan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar sebagai pintu gerbang keluar masuk logistik dari berbagai negara, namun Pelabuhan Batu Ampar masih harus dikembangkan sampai dengan kapasitas maksimum yang dibagi dalam tahapan pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.12. Tahapan Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar**

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025



**Gambar 3.13. Rencana Pengembangan Terminal Batu Ampar Ultimate**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

Untuk mencapai target jangka menengah berupa peningkatan kapasitas kontainer sebesar 4,7 juta TEUs pada tahun 2030, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar akan berfokus pada peningkatan fasilitas di Dermaga Utara diantaranya pengerukan kolam (-16 mLWS), pembangunan *container yard* (Reklamasi), pengadaan peralatan pendukung bongkar muat untuk mengurangi waktu tunggu bongkar muat kapal (*dwelling time*).



**Gambar 3.14. Rencana Pengembangan Terminal Pelabuhan Batu Ampar Jangka Menengah (2026-2030)**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

## B. Pengembangan Bandara Hang Nadim

Pengembangan Bandara Hang Nadim merupakan *milestone* pembangunan bagi kawasan-kawasan strategis lainnya di Kota Batam. Bandara Hang Nadim merupakan hub utama dalam menstimulasi investasi ekonomi, mempromosikan pariwisata dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil perencanaan Masterplan, Development Plan dan Pra Studi Kelayakan Bandara Hang Nadim. Kawasan Bandara akan menjadi pintu utama dari pengembangan kawasan Kota Batam secara keseluruhan dalam mencapai tujuan pengembangan ke depan sebagai Kota logistik, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.



**Gambar 3.15. Tahapan Rencana Pengembangan Bandara Hang Nadim**

*Sumber: Pusrenpros, 2025*

Pengembangan Bandara Hang Nadim dibagi menjadi 3 tahap pengembangan, yaitu:

### a. Tahap 1 tahun 2021-2031

Fokusnya adalah Pengembangan Terminal Kargo tahap 1, Pengembangan Terminal 2, Pengembangan Apron Terminal Penumpang, Isolated Area Runway 1.

### b. Tahap 2 tahun 2032-2041

Fokusnya adalah Pengembangan Ultimate Terminal 2, Pengembangan Apron Kargo dan MRO, Pengembangan Terminal Kargo tahap 2, Pengembangan Parallel Taxiway runway 1.

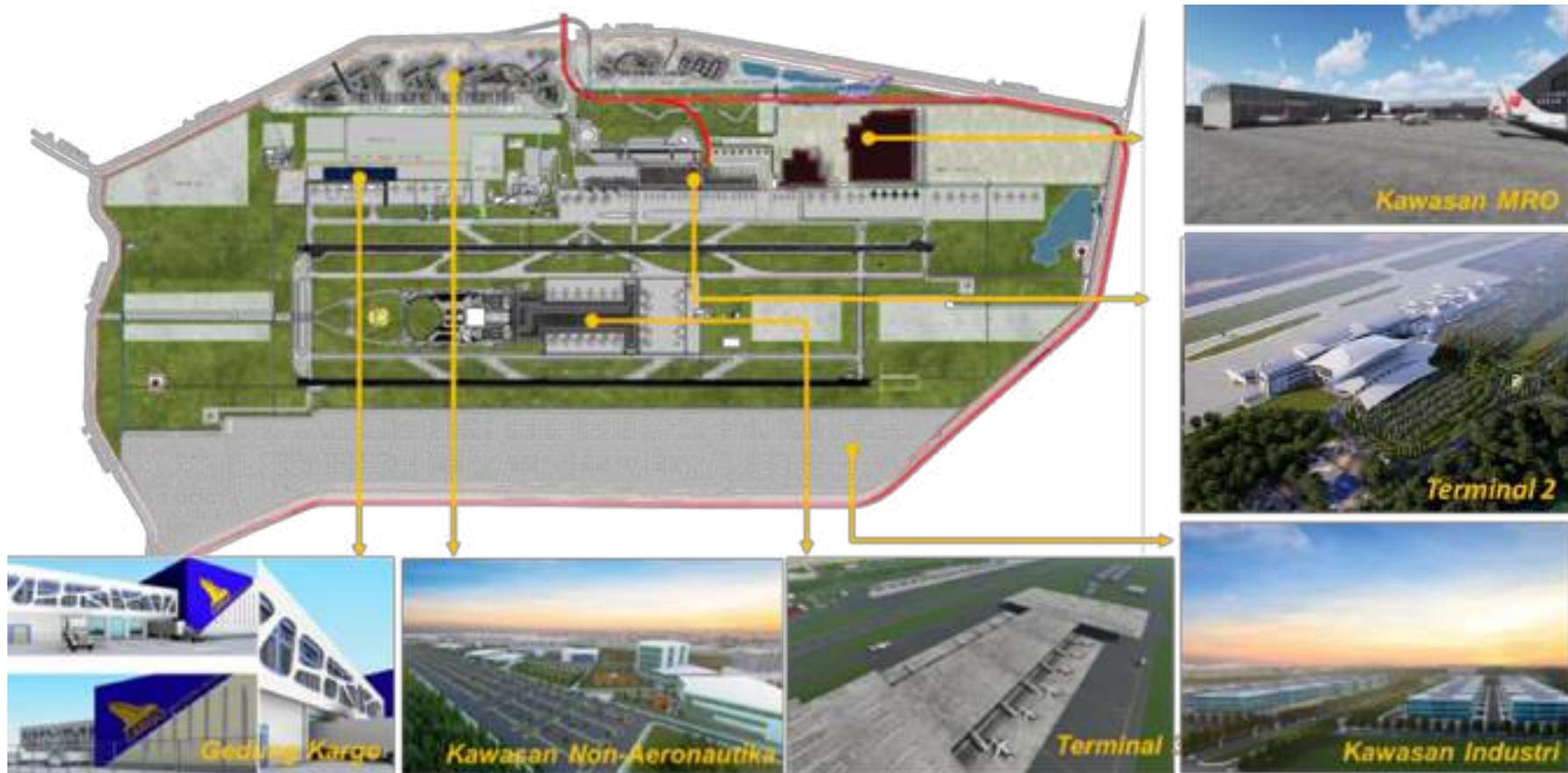
### c. Tahap 3 tahun 2042-2055

Fokusnya adalah Pengembangan Terminal 3 (ultimate), Pengembangan Parallel Taxiway, Pengembangan Apron Kargo, Pengembangan Terminal Kargo ultimate.

Pada tahun 2022 pengelolaan dan pengembangan Bandara Hang Nadim telah dikerjasamakan dengan mekanisme KPBU oleh BP Batam

dengan PT. Bandara Internasional Batam (BIB) yang merupakan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I, Incheon Internasional Airport Corporation (IIAC) Korea Selatan, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA. Jangka waktu kerja sama selama 25 tahun dengan total investasi Rp6,9 triliun, dimana dalam tahap pertama akan dibangun terminal 2, pengembangan terminal kargo tahap 1, serta isolated runway.

Diharapkan dengan terbangunnya terminal 2 bisa meningkatkan kapasitas bandara dari 3,9 juta menjadi 9,8 juta penumpang per tahun, disertai penambahan kapasitas parkir pesawat dari 24 menjadi 30. Pembangunan terminal kargo baru juga diharapkan bisa mewujudkan Batam sebagai hub kargo internasional, membuka akses pasar Asia Timur melalui kerja sama dengan Bandara Incheon Korea, serta mengambil sebagian pergerakan kargo yang selama ini masuk melalui Singapura.



**Gambar 3.16 Rencana Pengembangan Bandara Hang Nadim Batam**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

### C. Pengembangan Rumah Sakit BP Batam

Guna melengkapi fasilitas investasi agar Batam lebih menarik bagi investor dan untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, maka salah satu rencana jangka menengah BP Batam yaitu pengembangan infrastruktur fasilitas kesehatan Rumah Sakit Badan Pengusahaan yang terletak di Sekupang untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik, terpadu dan berkesinambungan. Rencana pengembangan tersebut memiliki layanan unggulan diantaranya *cardiovascular center, center of geriatric, women and fertility center, cancer center, cosmetic and plastic surgery, dan stem cell center.*

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang memiliki luas 47,17 Ha berada di 2 (dua) lokasi yaitu Sekupang dengan luas 23,10 Ha dan Nongsa dengan luas 24,07 Ha. Adapun kegiatan utamanya antara lain:

1. *International hospital dan specialist center;*
2. Industri farmasi dan alat kesehatan;
3. *International Standardized Healthscare Shool;*
4. *Healing Garden;* dan
5. *Wellness Tourism.*

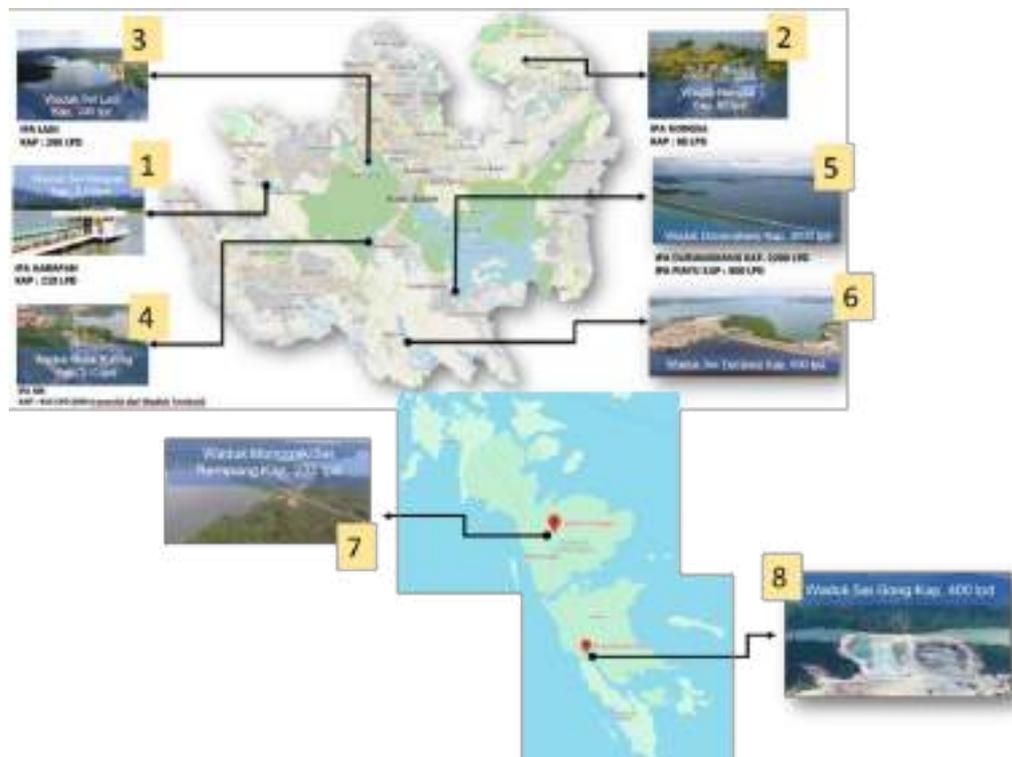


**Gambar 3.17 Rencana Pengembangan Pariwisata dan Kesehatan Internasional Sekupang**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

#### D. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum

Kebutuhan air bersih di KPBPB Batam (Batam, Rempang dan Galang) akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dengan persentase terbesar dibutuhkan oleh kegiatan industri dan pariwisata. Layanan air bersih di Batam bersumber dari 8 (delapan) Waduk yang tersebar di Batam sampai ke Galang. Pada tahun 2025 penggunaan air baku waduk telah mencapai kapasitas maksimumnya, hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2020-2024 untuk meningkatkan kapasitas produksi air baku dengan membangun beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di 3 (tiga) Waduk yaitu : Waduk Duriangkang kapasitas WTP 500 ltr/dtk, Waduk Mukakuning kapasitas WTP 350 ltr/dtk, dan Waduk Tembesi kapasitas WTP 230 ltr/dtk, namun saat ini masih terdapat *stress area* pada wilayah pelayanan karena belum optimalnya perpipaan distribusi yang ada sehingga program jangka menengah kedepan diperlukan kegiatan perkuatan pipa.



**Gambar 3.18 Kapasitas Waduk di KPBPB Batam**

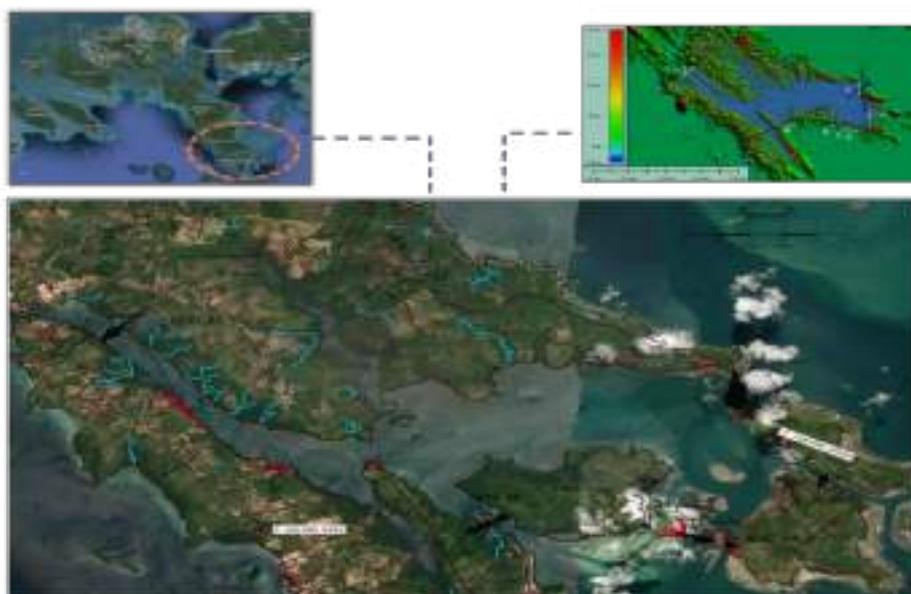
Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

Berdasarkan hasil perhitungan, proyeksi kebutuhan air baku di kawasan Barelang pada tahun 2030 yaitu sebesar 8505 liter/detik di tahun 2030. Dengan nilai proyeksi yang terus meningkat tiap tahunnya, maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi kondisi proyeksi tersebut.

Pembangunan sarana pendukung untuk meningkatkan kapasitas persediaan air baku dan air bersih terus dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan air baku dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air di Batam yang dilakukan dengan 3 (tiga) langkah revitalisasi dan optimasi *reservoir* sebagai berikut:

1. Rehabilitasi lahan yang akan dilaksanakan di daerah tangkapan dan resapan air untuk mengurangi limpasan permukaan pembawa material tanah;
2. Pengerukan sedimen di beberapa waduk; dan
3. Pembangunan *Stoplock Dam* untuk menambah kapasitas waduk.

Selain itu diperlukan upaya yang strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih masa depan yaitu Pembuatan Waduk Laut Galang-Galang Baru kapasitas IPA 2.600 ltr/dtk dan *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)* yang tahap pertama akan dilakukan di wilayah Nongsa dengan kapasitas 300 ltr/dtk.



**Gambar 3.19 Waduk Laut Galang-Galang Baru**

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025



**Gambar 3.20 Lokasi SWRO Nongsa**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

#### **E. Pengembangan Jalan dan Jembatan**

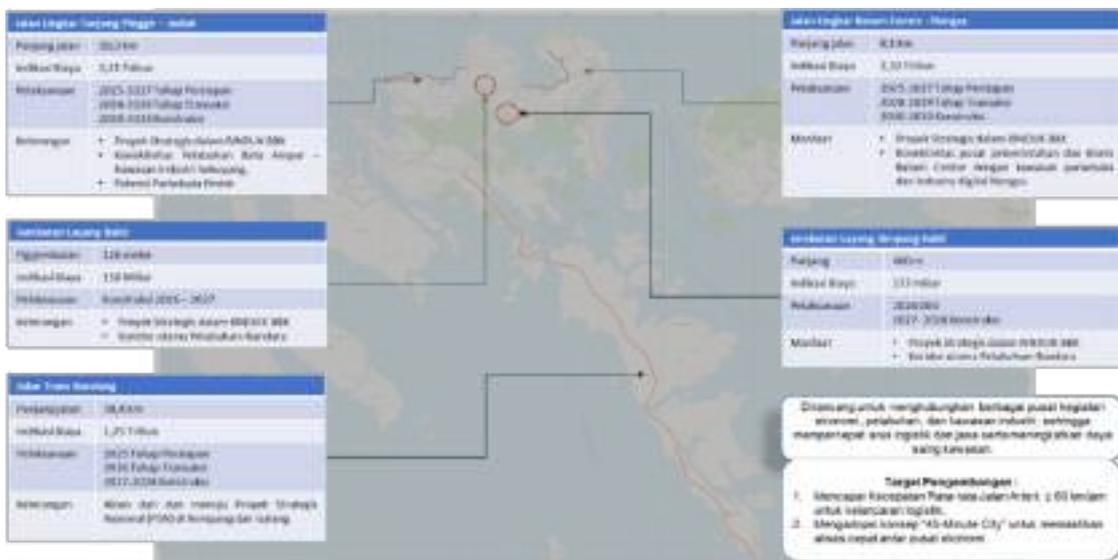
Pengembangan jalan koridor utama yang menghubungkan Pelabuhan Batu Ampar dengan Bandara Hang Nadim dilanjutkan sampai Kawasan Pariwisata Nongsa Batu Besar sepanjang 34 km dengan masing-masing jalur memiliki 5 lajur, sehingga aksesibilitas dari dan ke Pelabuhan, Bandara dan Kawasan Industri menjadi lebih lancar dan memperkecil waktu tempuh.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan agar konektivitas jalan semakin terhubung dengan baik, diperlukan pembangunan jalan alternatif khususnya di wilayah yang tingkat kepadatannya sudah mendekati over kapasitas yang menyebabkan terbatasnya akses menuju kawasan tersebut menjadi salah satu faktor arus lalu lintas yang padat pada jalan eksisting. Diharapkan dengan pembangunan jalan alternatif di wilayah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk melancarkan arus lalu lintas barang dan jasa yang terjadi pada daerah kawasan jalan tersebut, menguraikan kepadatan *traffic* serta meningkatkan pertumbuhan investasi di lokasi-lokasi terluar yang selama ini sulit untuk diakses, selain itu juga akan membuka daerah-daerah paling pinggir yang terhubung oleh jembatan, sehingga terjadi arus

transportasi & pemanfaatan lahan yang lebih baik serta dapat menghidupkan potensi pariwisata pesisir.

Lebih lanjut, diperlukan pembangunan *flyover* pada jalan koridor utama (Jalan Yos Sudarso) Pelabuhan-Bandara di dua titik yaitu simpang baloi dan simpang kabil untuk mengurangi *bottleneck* di ruas jalan tersebut. Sementara itu akses ke wilayah pengembangan kawasan ekonomi baru di Rempang dan Galang perlu ditingkatkan dari kondisinya saat ini yang sudah memiliki 1 jalur menjadi masing-masing jalur memiliki 2 lajur, sehingga dapat mengakomodir kendaraan berat menuju dan dari kawasan Rempang-Galang ke Batam terutama pada masa pemabangunan kawasan tersebut. Adapun rencana pengembangan jalan di Batam adalah sebagai berikut:

- Jalan Lingkar Tanjung Pinggir - Jodoh, sepanjang 10,3 kilometer;
- Jalan Lingkar Batam Centre - Nongsa, sepanjang 8,1 kilometer;
- Jembatan Layang Baloi, sepanjang 126 meter;
- Jembatan Layang Simpang Kabil, sepanjang 460 meter; dan
- Jalan Trans Bareleng, sepanjang 58,8 km.



**Gambar 3.21 Rencana Pengembangan Jalan di Batam**

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis, 2025

## F. Drainase (Penanggulangan Banjir)

Pengembangan infrastruktur sistem drainase di kawasan KPBPB Batam ditujukan sebagai pengendali banjir dengan manajemen pelimpasan air hujan serta menambah potensi air baku. Pada tahun 2025 terdapat 133 titik genangan banjir yang tersebar di seluruh wilayah Batam yang mana 20 diantaranya merupakan titik prioritas yang perlu segera ditanggulangi meliputi area simpang kabil, kawasan industri tunas, sekitar kawasan industri panbil, drainase Jl. Trans Bareleng, kawasan Nongsa, Jodoh, Bengkong, dan Marina.



**Gambar 3.22 Lokasi Titik Genangan di Batam**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

## G. Pengembangan Fasilitas Lingkungan

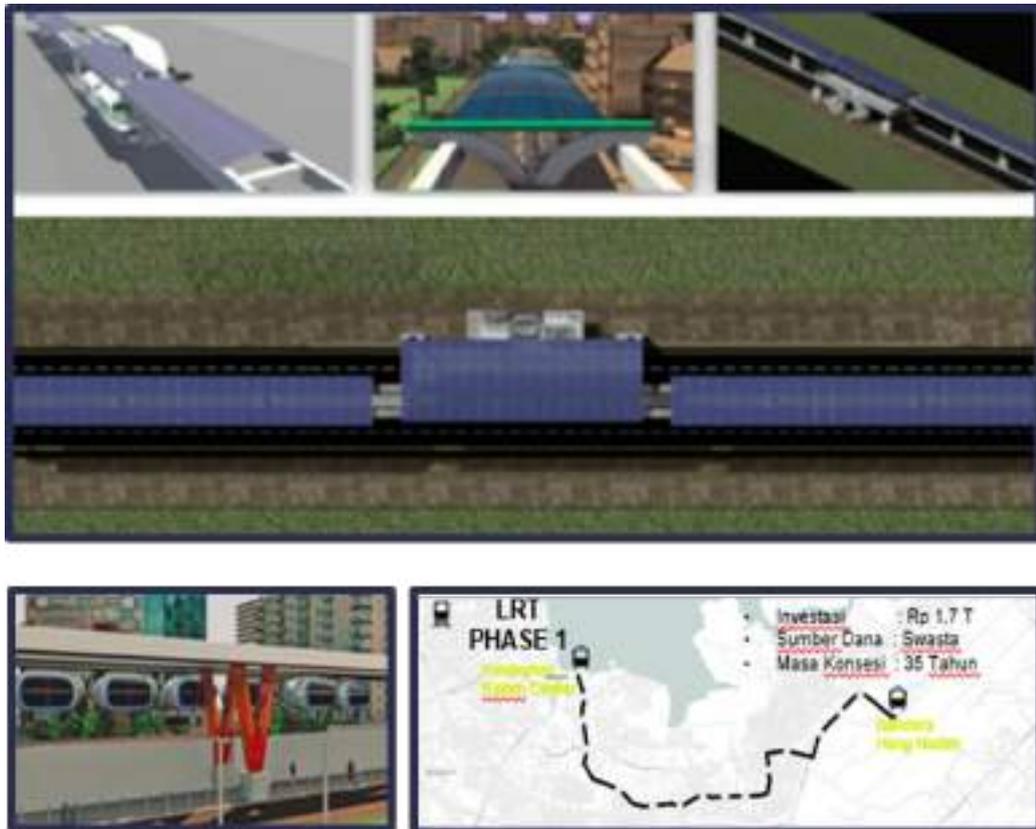
Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan pemisahan antara sistem saluran drainase dan sistem pengelolaan air limbah yang diselenggarakan secara bertahap. BP Batam mengembangkan pengelolaan air limbah rumah tangga & industri sebelum dibuang ke perairan laut.

Upaya yang dilakukan yaitu pengembangan infrastruktur *Wastewater Treatment Plant (WWTP)* atau IPAL dilakukan dengan perbaikan bangunan SDB, *incenerator* dan pintu gerbang IPAL serta perluasan kawasan

Pengolahan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil, serta membangun IPAL terpusat baru untuk kebutuhan limbah domestik di Batam Center, Tanjung Uma, Sekupang, Tembesi, Telaga Punggur dan Kabil dan lokasi lainnya.

#### H. *Light Rapid Transit (LRT)*

Dalam rangka mendukung program peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi penggunaan transportasi massal yang bermanfaat dalam menghilangkan kemacetan, sekaligus pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon, serta terciptanya tata kota berorientasi *Transit Oriented Development (TOD)* dan transportasi intermoda yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Batam, maka BP Batam merencanakan pembangunan LRT.



**Gambar 3.23 Rencana Pengembangan *Light Rapid Transit (LRT)* di Batam**

*Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025*

Pada tahap pertama, trase dengan panjang +-11 Km akan yang direncanakan akan menghubungkan Bandara Hang Nadim – Pelabuhan Batam Center. Trase ini

akan mempermudah konektivitas pergerakan orang dan barang dalam sebuah jalur penghubung industri, pariwisata, dan logistik.

## **I. Pengembangan Aset Lainnya**

BP Batam juga berfokus untuk melakukan pengembangan infrastruktur pada aset lainnya, meliputi:

### **1. Rumah Susun**

Keberadaan kawasan permukiman memberikan pengaruh cukup besar pada tata bangunan, lingkungan dan wajah kota, sehingga perlu penanganan yang khusus. Konstelasi kawasan lainnya umumnya muncul di sekitar kawasan industri, di mana kebutuhan hunian untuk pekerja sektor industri seringkali mendorong terciptanya permukiman padat dan kumuh. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kualitas pemukiman atau rumah susun (rusun) di berbagai area seperti: rusun Muka Kuning, rusun Sekupang, rusun Tanjung Uncang, rusun Batu Ampar dan rusun Kabil.

### **2. Asrama Haji**

Pengembangan infrastruktur asrama haji salah satunya dilakukan dengan melakukan perbaikan di beberapa titik fasilitas seperti pengadaan dan pemasangan peralatan pendukung acara di gedung aula dan mesin asrama, serta pengadaan dan peningkatan fasilitas kamar asrama haji.

### **3. Sport Hall**

Kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan infrastruktur sports hall Tumenggung Abdul Jamal yaitu dengan perbaikan gedung pengadaan peralatan dan mesin olahraga serta perbaikan panel listrik stadion.

### **4. Guest House**

Pengembangan guest house BP Batam di Sekupang, Batam dan Kuningan, Jakarta.

Tahap pengembangan infrastruktur pada aset lainnya yaitu dengan membuat kajian bisnis (*Final Business Case* dan *Outline Business Case*) pada aset yang belum optimal seperti Gedung Beringin dan Gedung Ex-Pabrik PT. PCI.

Dari peningkatan infrastruktur dan aset di atas yang mana sebagian besar merupakan aset yang menjadi sumber penerimaan BP Batam yang didapatkan dari penyediaan layanan kepada masyarakat, maka ditargetkan akan terjadi peningkatan penerimaan BP Batam, adapun sumber penerimaan terbesar BP Batam saat ini, meliputi:

1. Layanan Pengelolaan Lahan

Dengan adanya pengembangan pulau Rempang dan Galang akan meningkatkan penerimaan BP Batam melalui penerimaan Uang Wajib Tahunan (UWT).

2. Layanan Sistem Pengelolaan Air Minum.

Adanya peningkatan fasilitas air minum berupa pembangunan instalasi pengolahan air yang menambah kapasitas produksi air bersih serta pembangunan dan peningkatan jaringan pipa yang meningkatkan volume air yang terdistribusi ke pelanggan baik industri maupun masyarakat. Selain itu, telah direncanakan pula pembangunan sumber penyediaan air bersih melalui desalinasi (SWRO) yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan air khususnya kebutuhan industri.

3. Layanan Pelabuhan Laut

Peningkatan fasilitas di terminal Batu Ampar melalui kerjasama, selain itu pengembangan terminal kabil, serta optimalisasi pelayanan pada terminal penumpang baik domestik dan internasional.

Selain penerimaan BP Batam dari sumber-sumber utama diatas, terdapat pula penerimaan dari sumber lain seperti Penerimaan Bandara, Rumah Sakit, Fasilitas dan Lingkungan, serta penerimaan pajak yang tercatat pada Biro Keuangan. Adapun rincian target penerimaan BP Batam dari layanan-layanannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Layanan	Target (Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Layanan Keuangan	43.313.000	46.720.866	50.396.865	54.362.090	58.639.299
2	Layanan Pengelolaan Pertanahan	893.967.000	964.304.324	1.040.175.788	1.122.016.819	1.210.297.102
3	Layanan Infrastruktur Kawasan	6.821.000	8.854.655	9.551.340	10.302.839	11.113.467
4	Layanan Lalin Barang dan Penanaman Modal	2.496.000	2.371.247	2.557.817	2.759.066	2.976.149
5	Layanan Pelabuhan Laut	401.893.000	490.154.130	528.719.458	570.319.105	615.191.812
6	Layanan Bandar Udara	108.980.000	130.482.425	140.748.782	151.822.896	163.768.322
7	Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.146.000	13.494.630	14.556.388	15.701.685	16.937.094
8	Layanan Rumah Sakit	175.336.000	178.269.137	192.295.353	207.425.151	223.745.362
9	Layanan SPAM	304.583.000	575.829.847	621.136.139	670.007.131	722.723.292
10	Layanan Fasilitas Lingkungan	30.768.000	36.541.304	39.416.374	42.517.655	45.862.944
11	Layanan Aset Lainnya	795.000	925.965	998.821	1.077.408	1.162.178
<b>TOTAL</b>		<b>1.978.098.000</b>	<b>2.447.948.530</b>	<b>2.640.553.124</b>	<b>2.848.311.844</b>	<b>3.072.417.020</b>

**Tabel 3.1 Rincian Target Penerimaan BP Batam 2025-2029**

*Sumber: Pusrenpros, 2025*

### 3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku BP Batam dalam Pengelolaan KPBPB Batam. Kebutuhan kerangka regulasi BP Batam dalam tahun 2025-2029 harus mampu mengakomodasi proses transformasi ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien.

Adapun kerangka regulasi BP Batam tahun 2025-2029 dapat terlihat dari tabel di bawah ini, sedangkan untuk lengkapnya akan dijabarkan pada lampiran.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Pengaturan pembentukan Dewan Kawasan	Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 masa tugas Dewan Kawasan KPBPB Batam telah berakhir sejak tanggal 21 Februari 2021 dan belum ada Pembentukan Dewan Kawasan yang baru
2	Pengaturan status kelembagaan	Belum adanya pengaturan status kelembagaan BP Batam yang menegaskan BP Batam sebagai instansi K/L, sedangkan pola pengelolaan keuangan mengikuti peraturan BLU
3	Pengaturan status kepegawaian	Belum adanya pengaturan status kepegawaian BP Batam yang menjadi monostatus. Saat ini pegawai PNS di BP Batam merupakan status diperbantukan atau dipekerjakan dari berbagai kementerian/ lembaga lain, sehingga BP Batam perlu memiliki nomenklatur sendiri sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 pegawai BP Batam terdiri dari PNS dan Non PNS, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 pegawai BP Batam dapat berasal dari ASN, Non ASN dan Tenaga Profesional, sehingga perlu aturan khusus berupa Peraturan Pemerintah
4	Pengaturan sinkronisasi perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025	Adanya perizinan sesuai PP 41 Tahun 2021 yang saat ini masih dikeluarkan oleh instansi lain yaitu di bidang Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
5	Pengaturan percepatan perizinan investasi	Adanya perizinan yang masih dikeluarkan dari instansi pusat dan daerah seperti Amdal oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Izin lingkungan dan Persetujuan Bangunan dan Gedung oleh Pemerintah Kota agar menjadi kewenangan BP Batam kembali
6	Pengaturan percepatan penerbitan status HPL di Pulau Rempang dan Pulau Galang	Belum adanya pengaturan untuk percepatan penerbitan HPL Rempang dan Galang oleh Kementerian ATR/BPN sehingga berdampak pada rencana investasi pengembangan di PSN Rempang <i>Eco City</i> dan PSN Kawasan Industri Wiraraja Galang

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
7	Pengaturan Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang masuk dalam KPBPB Batam	Adanya potensi pasar transshipment sebesar 70 juta TEUs di perairan selat Philips yang dapat ditarik ke Indonesia, namun P.Tanjung Sauh dan P.Ngenang belum termasuk dalam wilayah KPBPB Batam, sehingga perlu ditetapkan sebagai bagian dari wilayah kerja KPBPB Batam dan menetapkannya sebagai pelabuhan HUB Transshipment untuk wilayah Indonesia Bagian barat
8	Pengaturan keluar masuk barang kontainer khusus di Wilayah KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan khusus keluar masuk barang kontainer di wilayah KPBPB Batam antara Kementerian Keuangan Cq. Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan BP Batam
9	Pengaturan Rencana Rinci (RRP) khususnya 5 Wilayah Penataan dan Pengembangan	Belum adanya pengaturan RRP yang menjadi Kawasan Prioritas Pembangunan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 dan mempedomani Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK yang selanjutnya menjadi acuan/pedoman tata ruang di KPBPB Batam
10	Pengaturan pengelolaan prasarana jalan di KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan pemeliharaan jalan di wilayah KPBPB Batam yang merupakan aset BP Batam, sehingga diperlukan peraturan terkait potensi PNBPN terhadap penggunaan jalan melalui pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pajak Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Kota.
11	Pengaturan penindakan bangunan dan pemanfaatan hutan tidak berizin di wilayah kerja KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan penindakan terhadap bangunan tidak berizin dan pemanfaatan catchment area oleh Direktorat Pengamanan Aset BP Batam
12	Pengaturan alokasi tanah yang efektif sesuai perencanaan pembangunan kawasan Bareleng untuk peningkatan investasi	Belum adanya pengaturan penyelesaian 7 ribu hektar lahan menganggur dari 700 proyek yang mangkrak yang hingga saat ini masih menghambat investasi di Batam. Selanjutnya perlu regulasi terkait pembangunan pemukiman vertikal dan membatasi rumah tapak.
13	Pengaturan hubungan kerja antara BP Batam dengan Pemko Batam	Belum adanya pengaturan hubungan unit kerja antara BP Batam dengan Pemerintah Kota terkait bidang Pariwisata dan PBK, Kehutanan, Perikanan di Kawasan DAM

**Tabel 3.2 Kerangka Regulasi BP Batam Tahun 2025 – 2029**

*Sumber: Pusrenpros, 2025*

### 3.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BP Batam diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan pengelolaan dan pengembangan KPBPB Batam agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan adalah perangkat organisasi BP Batam yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka struktur kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdiri dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau yang disingkat Badan Pengusahaan.

Tugas-tugas Badan Pengusahaan Batam telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, yaitu; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Kawasan Batam). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 telah ditetapkan bahwa Kepala BP Batam dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam dan Wakil Kepala BP Batam dijabat *ex-officio* oleh Wakil Wali Kota Batam. Selanjutnya, penetapan organisasi baru di tetapkan dengan keluarnya Peraturan Dewan Kawasan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terdiri dari:

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Anggota/ Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;
4. Anggota/ Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan;
5. Anggota/ Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;
6. Anggota/ Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan;
7. Anggota/ Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan & Lalu Lintas Barang;
8. Anggota/ Deputi Bidang Pelayanan Umum; dan
9. Anggota/ Deputi Bidang Infrastruktur.



**Gambar 3.24 Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam**

*Sumber: BP Batam, 2025*

BP Batam adalah lembaga pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) diawasi oleh Dewan Pengawas yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas, penasihat dan pengarah agar organisasi berjalan dengan benar. Kewajiban Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan BP Batam dan Anggota/Deputi BP Batam mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Kepala BP Batam;
2. Melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BP Batam dan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan paling sedikit dua kali dalam satu tahun; dan
4. Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegal.

Lebih lanjut, guna menjawab tantangan yang akan datang di mana memerlukan kecepatan, keakuratan dan efektivitas tinggi, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan kelembagaan, yaitu:

1. Menetapkan BP Batam menjadi instansi pemerintah non-struktural agar jenjang karir sumber daya manusia di lingkungan BP Batam yang berstatus PNS dapat diatur secara spesifik; dan
2. Penetapan BP Batam menjadi monostatus untuk memberikan kejelasan terkait status pegawai tetap yang berada di BP Batam.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan lingkungan, akan dilakukan dalam restrukturisasi kelembagaan di BP Batam di antaranya:

1. Menyusun struktur organisasi yang ringkas dan efektif sesuai dengan fungsi sehingga pelaksanaan pengelolaan di BP Batam berjalan efisien;
2. Membangun tata kelola yang transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*;
3. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM BP Batam dan menjalankan reformasi birokrasi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pada layanan yang ada di BP Batam guna peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders*; dan
5. Penerapan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025.

Data Bulan Oktober 2024, menyebutkan Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam dengan jumlah total 2.192 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 1.361 orang dan Pegawai Non PNS sejumlah 1.887 orang. Di samping itu selain tenaga PNS dan Non PNS terdapat juga tenaga kontrak BP Batam yang kini berjumlah 305 orang. Rincian komposisi SDM BP Batam menurut status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>STATUS</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>I. PIMPINAN</b>	
PNS	2
NON PNS	4
POLRI	0
TNI	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6</b>
<b>II. PEGAWAI TETAP PNS/POLRI</b>	
PNS PENUGASAN	1.359
POLRI	2
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.361</b>
<b>III. PEGAWAI TETAP NON PNS</b>	
NON PNS	520
CAPEG NON	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>520</b>
<b>JUMLAH PEGAWAI TETAP</b>	<b>1.887</b>
<b>IV. PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)</b>	
STRUKTURAL	0
P2K PELAKSANA	290
STAF KHUSUS	7
TENAGA AHLI	8
<b>SUBTOTAL</b>	<b>305</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2.192</b>

**Tabel 3.3 Sumber Daya Manusia BP Batam**

*Sumber: Biro Sumber Daya Manusia BP Batam, 2024*

# BAB 4

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### WTP 230 L/D

Target Kinerja	80
Pelaksana Kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis	85
Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen	90
Kerangka Pendanaan	92
Kerangka Pendanaan Sumber PNB	92
Kerangka Pendanaan Sumber Non-APBN	95
Kerangka Pendanaan Program BP Batam	97
Kerangka Pendanaan Program Pengembangan Kawasan Strategis	97
Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen	98

#### **4.1 Target Kinerja**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan tahun 2025-2029 telah dirumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis. Keterkaitan ketiga Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial” telah dirumuskan Sasaran Strategis: 1) Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam, dan 2) Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel” telah dirumuskan Sasaran Strategis yaitu terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis BP Batam tersebut diukur melalui capaian target kinerja atau indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Tabel berikut menjelaskan target kinerja dan indikator kinerja sasaran strategis pada setiap sasaran strategis:

## Target Kinerja Sasaran Strategis BP Batam 2025-2029

Tujuan BP Batam	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1. KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.	1. Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	1. Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1. Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	Triliun Rupiah	46,29	52,31	59,56	68,23	78,56
		2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	2. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan umum dan kawasan	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
			3. Nilai realisasi PNBPN BP Batam	Triliun Rupiah	1,99	2,44	2,64	2,84	3,07
2. Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel.	2. Indeks Reformasi Birokrasi	3. Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	4. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA

**Tabel 4.1 Target Kinerja BP Batam 2025 – 2029**

*Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)*

## Target Indikator Kinerja Program BP Batam 2025-2029

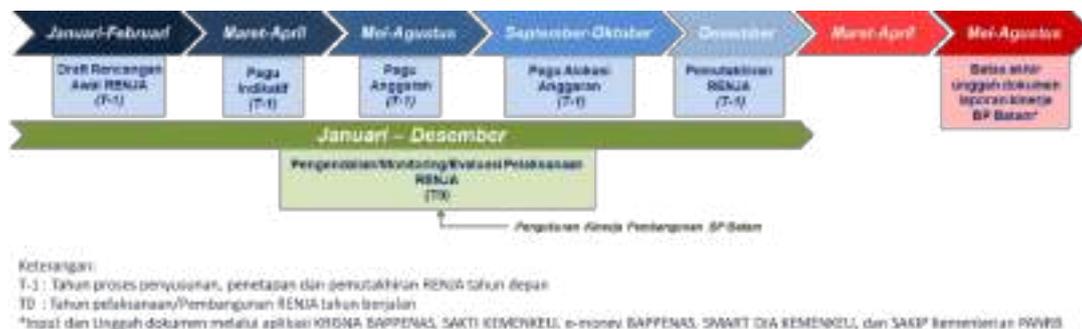
Nomenklatur Program		Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	SP 1	Meningkatnya efektivitas promosi dan kualitas realisasi investasi	IKP 1	Jumlah minat investasi	Minat	200	250	300	350	400
				IKP 2	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	46,29	52,31	59,56	68,23	78,56
		SP 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam	IKP 3	Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi	Hektar	800	800	800	800	800
				IKP 4	Persentase keberhasilan pengawasan dan pengendalian lahan, pesisir, dan reklamasi	Persen	70	75	80	85	90
		SP 3	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	IKP 5	Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi	Persen	100	100	100	100	100
				IKP 6	Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital	Persen	100	100	100	100	100
		SP 4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam	IKP 7	Rata-rata IKM pengguna layanan BU	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
				IKP 8	Realisasi PNBPU BU	Miliar Rupiah	510,67	790,62	852,83	919,93	992,32
		SP 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	IKP 9	Rata-rata IKM pengguna layanan bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
				IKP 10	Realisasi PNBPU kawasan bandara dan pelabuhan	Miliar Rupiah	510,87	620,63	669,45	722,13	778,95

Nomenklatur Program		Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
WA	Program Dukungan Manajemen	SP 6	Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	IKP 11	Indeks perencanaan pembangunan	Indeks	92	92	93	93	93
				IKP 12	Indeks kualitas kebijakan	Indeks	65	66	67	68	69
				IKP 13	Tingkat kematangan SPBE	Indeks	3,9	4,1	4,2	4,4	4,5
				IKP 14	IKM pengguna layanan PTSP	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
		SP 7	Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	IKP 15	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA
				IKP 16	Indeks sistem merit	Indeks	275	285	290	295	300
				IKP 17	Indeks maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
				IKP 18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Program BP Batam 2025 – 2029**

*Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)*

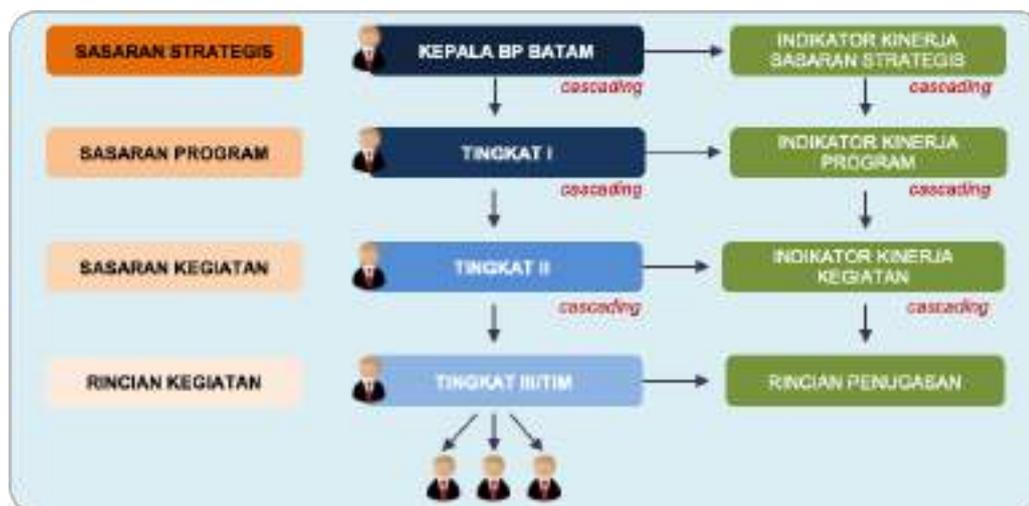
Dalam memastikan IKSS BP Batam dapat tercapai setiap tahunnya, maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.



**Gambar 4.1 Waktu Pengukuran Kinerja**

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja sasaran strategis (*cascading* IKSS) level lembaga BP Batam. Penurunan/Pemetaan indikator kinerja sasaran strategis (*cascading* IKSS) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses *cascading* IKSS berdasarkan *logic* model penurunan kinerja organisasi:



**Gambar 4.2 Alur Proses Cascading**

Sumber: BP Batam, 2024

Berdasarkan alur proses *cascading* IKSS tersebut penugasan setiap individu disusun berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Penugasan individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan tetap memperhatikan ketercapaian indikator kinerjanya.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam *cascading* IKSS BP Batam yaitu:

1. Menurunkan (*cascading*) indikator kinerja level lembaga sampai dengan indikator kinerja level eselon II/tingkat 2;
2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja eselon II/tingkat 2;
3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan; dan
4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas untuk masing-masing individu.

Data dukung yang digunakan untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai penugasan individu antara lain dokumen perjanjian kinerja Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II serta Tabel Informasi Kinerja dan Anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan Renja K/L).

#### **4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis BP Batam, yaitu: (SS-1) Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam, dan (SS-2) Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Pengembangan Kawasan Strategis.

Pelaksana kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis difokuskan untuk melaksanakan tugas utama BP Batam dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam. Anggota/Deputi yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Anggota/Deputi Bidang Investasi Dan Pengusahaan;
2. Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;
3. Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur;
4. Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum; dan

5. Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang.

Program Pengembangan Kawasan Strategis tersebut mempunyai 5 (lima) sasaran program yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas promosi dan kualitas realisasi investasi;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam;
3. Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam; dan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang.

Selanjutnya Sasaran Program pada Program Pengembangan Kawasan Strategis akan menghasilkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program, yaitu:

1. Jumlah minat investasi;
2. Nilai realisasi investasi;
3. Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi;
4. Persentase keberhasilan pengawasan dan pengendalian lahan, pesisir, dan reklamasi;
5. Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi;
6. Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital;
7. Rata rata IKM pengguna layanan BU;
8. Realisasi PNBP BU;
9. Rata-rata IKM pengguna layanan bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang; dan
10. Realisasi PNBP kawasan bandara dan pelabuhan.

Adapun pencapaian kelima sasaran program tersebut akan dilaksanakan oleh 14 (empat belas) kegiatan yang akan dikerjakan pada Program Pengembangan Kawasan Strategis, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi;
2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK;

3. Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama;
4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam;
5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
6. Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
7. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur;
8. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur;
9. Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan.
10. Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan;
11. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit;
12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara;
13. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; dan
14. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang.

Dari 14 (empat belas) kegiatan tersebut diturunkan dari Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang dapat dilihat pada tabel pemetaan berikut:

## Pemetaan Kegiatan BP Batam pada Program Pengembangan Kawasan Strategis

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
SS-1 Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	SP-1 Meningkatnya efektifitas promosi dan kualitas realisasi investasi	IKP-1 Jumlah minat investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi;</li> <li>2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK;</li> <li>3. Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama;</li> </ol>
		IKP-2 Nilai realisasi investasi	
	SP-2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam	IKP-3 Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi	
		IKP-4 Persentase keberhasilan pengawasan dan pengendalian lahan, pesisir, dan reklamasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;</li> </ol>
	SP-3 Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	IKP-5 Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur;</li> <li>8. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur;</li> </ol>
			IKP-6 Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
SS-2 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	SP-4 Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam	IKP-7 Rata-rata IKM pengguna layanan BU	10. Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan; 11. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit;
		IKP-8 Realisasi PNBPU BU	12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara; 13. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; 14. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang;
	SP-5 Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	IKP-9 Rata-rata IKM pengguna layanan Bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang	15. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara; 16. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; dan 17. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang;
		IKP-10 Realisasi PNBPU Kawasan Bandara dan Pelabuhan	

**Tabel 4.3 Pemetaan Kegiatan BP Batam pada Program Pengembangan Kawasan Strategis**

*Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)*

#### **4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen**

Untuk Sasaran Strategis BP Batam yaitu: SS-3. Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel akan dicapai melalui Program Dukungan Manajemen yang difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi 1. Tata kelola organisasi; 2. Sumber daya manusia; 3. Pengelolaan keuangan; 4. Perencanaan; 5. Pengendalian; 6. Layanan internal; dan 7. Barang milik negara.

Anggota/Deputi yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan; dan
2. Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam; dan
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam.

Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen akan diukur melalui 8 (delapan) buah Indikator Kinerja Program, yaitu:

1. Indeks perencanaan pembangunan;
2. Indeks kualitas kebijakan;
3. Tingkat kematangan SPBE;
4. IKM pengguna layanan PTSP;
5. Indeks reformasi birokrasi;
6. Indeks sistem merit;
7. Indeks maturitas SPIP; dan
8. Opini BPK.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut akan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dikerjakan pada Program Dukungan Manajemen, yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan Program Strategis;
2. Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis;
3. Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum;
8. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan;
9. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran; dan
10. Pengelolaan dan Pelayanan Umum.

Dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut diturunkan dari sasaran strategis dan sasaran program yang dapat dilihat pada tabel pemetaan berikut:

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
SS-3 Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	SP-6 Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	IKP-11 Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Penyusunan Perencanaan Program Strategis
		IKP-12 Indeks kualitas kebijakan	2. Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis
		IKP-13 Tingkat Kematangan SPBE	3. Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi;
		IKP-14 IKM pengguna layanan PTSP	4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
	SP-7 Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	IKP-15 Indeks Reformasi Birokrasi	5. Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja;
		IKP-16 Indeks Sistem Merit	6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
		IKP-17 Indeks maturitas SPIP	7. Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum;
			8. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan;

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
		IKP-18 Opini BPK	9. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran; 10. Pengelolaan dan Pelayanan Umum.

**Tabel 4.4 Pemetaan Kegiatan BP Batam pada Program Dukungan Manajemen**

Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan BP Batam yang merupakan bagian dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) utamanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa layanan yang diberikan oleh BP Batam kepada masyarakat, serta dapat berasal dari sumber pendanaan Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berasal dari pemerintah pusat.

Selain sumber pendanaan tersebut, BP Batam juga mengupayakan sumber pendanaan Non-APBN atau sumber pendanaan lain yang dapat berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja sama Operasi (KSO) dan Kerja sama Pemanfaatan aset (KSP).

### 4.2.1. Kerangka Pendanaan sumber PNBP

Pendanaan utama yang diterima oleh BP Batam yaitu PNBP yang berasal dari pendapatan layanan yang diberikan BP Batam kepada masyarakat dan investor yaitu:

1. Layanan Pengelolaan Pertanahan;
2. Layanan Pelabuhan Laut;
3. Layanan Bandar Udara;
4. Layanan Air Bersih;
5. Layanan Rumah Sakit;
6. Layanan Fasilitas Lingkungan;
7. Layanan Infrastruktur Kawasan;
8. Layanan Lalu Lintas dan Penanaman Modal;
9. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
10. Layanan Keuangan; dan
11. Layanan Lainnya.

Selain sumber pendanaan utama dari PNBPN tersebut, sumber pendanaan dari Rupiah Murni dan PHLN merupakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dalam rangka pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung investasi di KPBPB Batam.

## Target Kinerja dan Pendanaan BP Batam Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja					Program	Alokasi Anggaran (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
								<b>1.982.728.199</b>	<b>2.447.948.530</b>	<b>2.640.553.124</b>	<b>2.848.311.845</b>	<b>3.072.417.021</b>		
1	Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam	Triliun Rupiah	46,29	52,31	59,56	68,23	78,56*	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.086.213.919	1.348.920.479	1.455.053.544	1.569.537.158	1.603.028.342
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan umum dan kawasan	Indeks	87,5	88	88,5	89	90		906.514.280	1.099.028.051	1.185.499.560	1.278.774.687	1.379.388.679
3	Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA						
		Nilai realisasi PNBPN BP Batam	Triliun Rupiah	1,99	2,44	2,64	2,84	3,07**						

\* Publikasi Kepala BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 9 Juli 2025

\*\* TRPNBP 2026

**Tabel 4.5 Target Kinerja dan Pendanaan BP Batam 2025-2029**

*Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)*

#### **4.2.2. Kerangka Pendanaan sumber Non-APBN**

Sumber pendanaan yang berasal dari non-APBN dapat berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pola Kerja sama Operasi (KSO) atau Kerja sama Pemanfaatan aset (KSP), selain itu bentuk kerja sama ini juga memberikan manfaat bagi BP Batam berupa tambahan penerimaan dari bagi hasil. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan anggaran yang dialokasikan BP Batam untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan aset. Mekanisme kerja sama diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan aset yang selama ini belum maksimal atau belum termanfaatkan.

##### **1. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Salah satu tugas dan fungsi BP Batam adalah membangun dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, BP Batam mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan dengan skema KPBU sebagai berikut:

##### **1. KPBU Bandara Hang Nadim**

Pengembangan Bandar Udara Hang Nadim dilakukan untuk menjawab tantangan ke depan dan mengambil peluang dari meningkatnya potensi jumlah penumpang pesawat udara dan kargo logistik, pengembangan ini juga dilakukan dalam rangka mendukung KPBPB Batam sebagai kawasan hub logistik dan mendukung KPBPB Batam sebagai destinasi pariwisata melalui

pembukaan rute penerbangan internasional dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Lingkup pengelolaan dan pengembangan Bandara Hang Nadim meliputi peningkatan fasilitas terminal 1 penumpang yang telah dimulai pada periode sebelumnya dan akan dilanjutkan pada periode kali ini serta rencana pembangunan Bandara Hang Nadim terminal 2 penumpang dalam jangka menengah-panjang untuk memberikan layanan untuk 30 juta penumpang per tahun, serta pembangunan 237 air *traffic* movement (ATM), dan volume kargo 190.000 MT hingga tahun 2045.

## **2. Kerja sama Operasional (KSO)**

KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Sebagai pengelola dan pengembang kawasan, BP Batam memiliki aset-aset yang mendukung iklim investasi di KPBPB Batam. Untuk mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan aset tersebut, salah satu skema yang akan diterapkan adalah skema KSO.

Adapun rencana optimalisasi pengelolaan aset BP Batam yang dilakukan dengan skema KSO sebagai berikut:

- a. KSO Pelabuhan Barang dan Penumpang; dan
- b. KSO Pengelolaan air bersih dan limbah.

## **3. Kerja sama Pemanfaatan Aset**

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) merupakan bentuk pemanfaatan aset yang diharapkan menjadi suatu manajemen pengelolaan aset yang baik guna memaksimalkan potensi aset yang ada di BP Batam. Pendekatan kerja sama pemanfaatan aset dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut tidak hanya sebatas aset fisik bangunan melainkan penyiapan kawasan yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada tahun 2023 sampai 2024 sudah dilakukan Kerja sama Pemanfaatan Aset Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur (KSP DRPI) untuk Pelabuhan

Terminal Peti Kemas Batu Ampar dan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, sedangkan rencana kerja sama pemanfaatan aset yang akan dilakukan dengan skema KSP pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Fasilitas Kawasan Olahraga dan Rumah Susun Pekerja; dan
- b. Pengelolaan Kawasan Waduk untuk PLTS.

### **4.3. Kerangka Pendanaan Program BP Batam**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengelola kawasan dan badan layanan Umum serta upaya pencapaian target kinerja tahun 2025-2029 BP Batam merumuskan kerangka pendanaan untuk mendanai 2 program yaitu: 1) Program Pengembangan Kawasan Strategis, dan 2) Program Dukungan Manajemen.

#### **4.3.1. Kerangka Pendanaan Program Pengembangan Kawasan Strategis**

Pendanaan untuk Pengembangan Kawasan Strategis digunakan untuk menyelenggarakan fungsi utama kelembagaan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi;
2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK;
3. Pengendalian Perusahaan dan Kerjasama;
4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam;
5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
6. Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
7. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur;
8. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur;
9. Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan;
10. Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan;
11. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit;
12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara;
13. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; dan

14. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang.

#### **4.3.2. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen**

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan Program Strategis;
2. Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis;
3. Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum;
8. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan;
9. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran; dan
10. Pengelolaan dan Pelayanan Umum.

An aerial photograph of a modern highway interchange. The main road is elevated on a concrete viaduct. A road curves underneath the viaduct, with several cars visible. In the background, there is a large body of water with the text 'WADUK SEILADI' written on the grassy bank. The sky is filled with white, fluffy clouds. A semi-transparent grey box is overlaid on the upper part of the image, containing the text 'BAB 5' and 'PENUTUP' in yellow.

# BAB 5

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BP Batam 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dalam pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan KPBPB Batam untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka di dalam Renstra BP Batam dirumuskan visi BP Batam yaitu **“Kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

Renstra ini menjabarkan visi dan misi BP Batam sampai ke tahapan pelaksanaan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan setiap unit kerja selama 5 tahun untuk mendukung sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan BP Batam, serta menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BP Batam 2025-2029, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk target indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BP Batam sebagaimana tertuang dalam visi BP Batam.

Dalam rangka pencapaian hasil terbaik diperlukan komitmen dari berbagai pihak terkait sehingga tercipta sinergitas demi tercapainya target capaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya Renstra BP Batam 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi KPBPB Batam serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.



# LAMPIRAN

<b>Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029</b>	<b>103</b>
<b>Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Tahun 2025-2029</b>	<b>108</b>
<b>Matriks Kerangka Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029</b>	<b>110</b>

**Lampiran 1**  
**Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029**

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>112</b>	<b>Badan Pengusahaan Batam</b>									<b>1.802.728.189</b>	<b>2.447.948.538</b>	<b>3.643.613.134</b>	<b>2.840.311.848</b>	<b>3.872.417.021</b>		
<b>D1</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Strategis</b>									<b>1.086.213.810</b>	<b>1.348.820.678</b>	<b>1.455.033.544</b>	<b>1.589.537.158</b>	<b>1.693.028.342</b>		
<b>A1</b>	<b>Anggota Sidang Pengelolaan Lahan, Pasisir Dan Reklamasi</b>									<b>73.319.589</b>	<b>91.852.219</b>	<b>88.216.189</b>	<b>105.943.847</b>	<b>154.278.590</b>		
<b>5123</b>	<b>Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan KPSP Batam</b>									<b>39.868.964</b>	<b>49.912.249</b>	<b>52.968.534</b>	<b>57.028.229</b>	<b>61.515.212</b>	Direktorat Pengelolaan Lahan	
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan KPSP Batam	31- Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Lahan di Batam	Persentase perjanjian lahan yang selesai tepat waktu (sesuai Perka BP Batam No.11 Tahun 2023) Luas lahan yang diselesaikan Persentase penyelesaian permasalahan lahan	Persen Hektar Persen	100 600 70	100 600 75	100 600 80	100 600 85	100 600 90		39.868.964	49.912.249	52.968.534	57.028.229	61.515.212	
<b>8000</b>	<b>Pengelolaan dan Pemanfaatan Pasisir dan Reklamasi di Kawasan KPSP Batam</b>									<b>16.162.452</b>	<b>20.071.430</b>	<b>21.650.645</b>	<b>23.354.130</b>	<b>25.191.622</b>	Direktorat Pengelolaan Kawasan Pasisir Dan Reklamasi	
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Pasisir dan Reklamasi di Kawasan KPSP Batam	31- Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pasisir dan Reklamasi di Batam	Persentase perjanjian pasisir dan reklamasi yang selesai tepat waktu Luas kawasan pasisir dan reklamasi yang diselesaikan Persentase penyelesaian permasalahan pasisir dan reklamasi	Persen Hektar Persen	100 300 70	100 300 75	100 300 80	100 300 85	100 300 90		16.162.452	20.071.430	21.650.645	23.354.130	25.191.622	
<b>8001</b>	<b>Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pasisir dan Reklamasi di Kawasan KPSP Batam</b>									<b>17.600.089</b>	<b>21.968.539</b>	<b>23.697.019</b>	<b>25.561.499</b>	<b>27.573.676</b>	Direktorat Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pasisir dan Reklamasi	
3	Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pasisir dan Reklamasi di Kawasan KPSP Batam	31- Meningkatkan Akuntabilitas Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pasisir dan Reklamasi di Batam	Persentase keberhasilan pengawasan pengawasan pemertan dan pembangunan lahan, pasisir, dan reklamasi Persentase keberhasilan Di lakukan evaluasi dan pembatalan ekuitasi lahan, pasisir, dan reklamasi Persentase pelaksanaan kegiatan dokumentasi lahan, pasisir, dan reklamasi	Persen Persen Persen	70 70 100	75 75 100	80 80 100	85 85 100	90 90 100		17.600.089	21.968.539	23.697.019	25.561.499	27.573.676	
<b>A4</b>	<b>Anggota Sidang Investasi Dan Pengusahaan</b>									<b>25.768.130</b>	<b>32.890.208</b>	<b>34.918.872</b>	<b>37.233.593</b>	<b>40.163.689</b>		
<b>8002</b>	<b>Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama</b>									<b>3.224.227</b>	<b>4.004.004</b>	<b>4.319.081</b>	<b>4.658.834</b>	<b>5.028.445</b>	Direktorat Pengendalian Pengusahaan	
4	Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama	31- Meningkatkan Kualitas pengendalian pengusahaan dan kerjasama badan usaha di BP Batam	Persentase hasil evaluasi pengendalian, dan pembinaan badan usaha yang ditingkatkan Persentase hasil perbaikan, dan perubahan kerjasama usaha yang ditingkatkan	Persen Persen	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		3.224.227	4.004.004	4.319.081	4.658.834	5.028.445	
<b>6052</b>	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi</b>									<b>15.360.260</b>	<b>19.118.211</b>	<b>20.620.274</b>	<b>22.242.676</b>	<b>23.962.727</b>	Direktorat Investasi	
5	Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi	31- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal di KPSPS Batam 32- Terlaksananya kegiatan promosi dalam maupun luar negeri	Misi realisasi investasi di KPSPS Batam Jumlah minat investasi dari kunjungan dan pameran dalam dan luar negeri	Rp Triliun Miliar Investasi	46,29 300	52,31 360	58,58 500	68,22 380	78,56 400		15.360.260	19.118.211	20.620.274	22.242.676	23.962.727	
<b>8005</b>	<b>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan KPSP dan KIK</b>									<b>7.158.635</b>	<b>8.880.094</b>	<b>9.578.737</b>	<b>10.332.383</b>	<b>11.148.343</b>	Direktorat Pengembangan KPSPS Batam dan KIK	
6	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan KPSP dan KIK	31- Tersedianya dokumen kajian pengembangan pengembangan, kerjasama, daya saing, dan (Berkelanjutan)	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan, kerjasama, dan peningkatan daya saing KPSPS yang ditingkatkan Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan KIK yang ditingkatkan	persen persen	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		7.158.635	8.880.094	9.578.737	10.332.383	11.148.343	

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana		
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
112	<b>Badan Pengusahaan Batam</b>										1.692.726.188	2.447.948.830	2.640.933.124	2.848.311.848	3.072.417.621		
01	<b>Program Pengembangan Kawasan Strategis</b>										1.086.213.918	1.348.026.470	1.485.953.344	1.589.517.158	1.693.028.342		
A5	<b>Anggota Bidang Pengelolaan Bandars, Pelabuhan Dan Lala Lintas Barang</b>										70.521.131	87.577.840	94.467.689	101.900.312	109.317.628		
5124	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kebutuhan</b>										55.695.445	69.158.231	74.590.509	80.460.093	86.800.490	Direktorat Pengelolaan Kebutuhan	
7	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kebutuhan	01- Tercapainya Kinerja Kebutuhan yang sehat	Realisasi PNPB kebutuhan	Rp Miliar	448,13	490,10	528,71	570,21	610,19								
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebutuhan	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90								
			Jumlah pelayanan bongkar muat terminal kargo Batu Anjar	Ton	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	55.690.445	69.158.231	74.590.509	80.460.093	86.800.490			
			Jumlah pelayanan bongkar muat terminal peti kemas Batu Anjar	Tewa	700.000	700.000	800.000	800.000	900.000								
			Jumlah pelayanan bongkar muat terminal curah car Kabil	Ton	3.450.000	3.500.000	3.850.000	3.600.000	3.850.000								
			Jumlah penumpang pelabuhan domestik dan internasional	orang	8.500.000	8.700.000	9.000.000	9.250.000	9.750.000								
5125	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandars</b>										13.045.934	16.221.193	17.475.671	18.850.672	20.334.058	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandars	
8	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandars	01- Tercapainya pengelolaan kawasan bandars yang optimal	Realisasi PNPB kawasan bandars	Rp Miliar	116,32	130,46	143,74	161,62	183,76								
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan kawasan bandars	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90	13.045.934	16.221.193	17.475.671	18.850.672	20.334.058			
5129	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Lala Lintas Barang</b>										5.795.752	2.217.646	2.390.130	2.590.341	2.763.364	Direktorat Lala Lintas Barang	
9	Penyelenggaraan Pelayanan Lala Lintas Barang	01- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lala Lintas Barang di KPSRB Batam	Persentase pelayanan lala lintas barang perdagangan yang sesuai target waktu	Persen	100	100	100	100	100								
			Persentase pelayanan lala lintas barang industri yang sesuai target waktu	Persen	100	100	100	100	100	5.795.752	2.217.646	2.390.130	2.590.341	2.763.364			
A6	<b>Anggota Bidang Pelayanan Umum</b>										283.694.434	252.581.752	272.821.487	294.287.247	317.441.796		
5126	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit</b>										133.403.590	165.667.952	178.700.707	182.763.626	207.325.631	Badan Usaha Rumah Sakit	
10	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit	01- Tercapainya Kinerja Rumah Sakit BP Batam yang sehat	Realisasi PNPB rumah sakit	Rp Miliar	175,38	178,36	182,39	207,43	223,74								
			Realisasi PNPB rumah sakit meliputi peningkatan layanan	Rp Miliar	175,38	178,36	182,39	207,43	223,74								
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BUKS	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90	133.403.590	165.667.952	178.700.707	182.763.626	207.325.631			
			Rasio generasi terhadap pengalangan	Rasio	0,6	0,7	0,8	0,9	1								
5130	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAN, Fasilitas dan Lingkungan</b>										70.260.844	87.253.800	94.118.938	101.524.218	109.512.135	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan	
11	Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	01- Tercapainya Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Asin - Asin BP Batam yang Profesional dan Akuntabel	Realisasi PNPB pengelolaan air minum	Rp Miliar	623,43	675,82	621,13	670,00	722,72								
			Realisasi PNPB pengelolaan lingkungan	Rp Miliar	33,87	36,54	39,41	42,51	45,88								
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan air minum dan lingkungan	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90	70.260.844	87.253.800	94.118.938	101.524.218	109.512.135			
			Rasio generasi terhadap pengalangan	Rasio	1	1	1	1	1,1								

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcoms) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	Basis Pengawasan Batam									1.982.728.199	2.447.948.533	2.648.585.124	2.848.391.845	3.072.497.821	
011	Program Pengembangan Kawasan Strategis									1.885.213.013	1.348.820.479	1.455.933.544	1.369.337.338	1.893.028.342	
A1	Anggka Besar Infrastruktur									732.946.712	685.369.188	955.830.037	1.038.171.795	1.111.325.723	
0127	Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur									644.034.026	799.796.171	862.726.250	838.695.596	1.003.625.653	Direktoral Pembangunan Infrastruktur Kawasan
12	Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur	01- Meningkatkan Akses, Akses dan Mutu Prasarana dan Sarana	Jumlah fasilitas jalan yang dibangun	Km	13,80	15,74	9,80	10	10	644.034.026	799.796.171	862.726.250	838.695.596	1.003.625.653	
Jumlah fasilitas pejalan kaki yang dibangun			Unit	0	4	3	1	0							
Jumlah fasilitas bandar udara yang dibangun			Unit	0	0	0	1	0							
Jumlah fasilitas rumah sakit yang dibangun			Unit	0	2	3	0	0							
Jumlah fasilitas air baku dan air bersih yang dibangun			Unit	0	9	8	2	1							
Jumlah fasilitas air limbah dan lingkungan hidup yang dibangun			Unit	0	2	3	0	0							
Jumlah fasilitas pengembangan kawasan dan perkotaan yang dibangun			Kawasan	1	1	1	1	1							
0601	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur									7.666.895	8.546.011	10.287.091	11.187.265	11.981.185	Direktoral Perencanaan Infrastruktur
13	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur	01- Terejadinya dokumen perencanaan teknis yang berkualitas	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan teknis bangunan dan utilitas lain	Persen	100	100	100	100	100	7.666.895	8.546.011	10.287.091	11.187.265	11.981.185	
Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan teknis pertukangan dan utilitas lain			Persen	100	100	100	100	100							
Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan teknis lingkungan dan utilitas lain			Persen	100	100	100	100	100							
0134	Penyelenggaraan Pengamanan Asat dan Kawasan									81.218.804	78.025.008	82.806.653	88.459.336	95.418.885	Direktoral Pengamanan Asat dan Kawasan
14	Penyelenggaraan Pengamanan Asat dan Kawasan	01- Terejadinya Pengamanan yang Efektif Terhadap Asat-Asat DP Dalam	Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, laut, dan objek vital	Persen	100	100	100	100	100	81.218.804	78.025.008	82.806.653	88.459.336	95.418.885	
Persentase keberhasilan penertiban bangunan liar			Persen	100	100	100	100	100							

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	Badan Pengusahaan Batam									1.992.728.199	2.447.948.530	2.840.553.124	2.848.311.845	3.072.417.321	
WA	Program Dukungan Manajemen									906.514.280	1.099.028.911	1.185.400.593	1.278.774.887	1.379.388.679	
A1	Anggota Bidang Administrasi Dan Keuangan									804.811.088	932.114.193	1.095.452.948	1.084.561.978	1.188.686.399	
5114	Pengelolaan dan Pelayanan Umum									149.891.602	183.887.285	188.395.513	213.962.127	230.796.885	Biro Umum
16	Pengelolaan dan Pelayanan Umum	01- Terpenuhinya Kebutuhan Kemahkotaan, Kesekretariatan, Pengadaan, Humas dan Protokol yang efektif dan efisien	Tingkat digitalisasi arsip	Indeks (Skala 1-100)	80	81	81	82	82	149.891.602	183.887.285	188.395.513	213.962.127	230.796.885	
Indeks tata kelola pengadaan			Indeks (Skala 1-100)	88	89	89	89	90							
Indeks pengelolaan aset			Indeks	3,8	3,7	3,8	3,8	4							
Indeks keterbukaan informasi publik			Indeks (Skala 1-100)	90	90	91	91	91							
Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan tamu			Persenan	100	100	100	100	100							
5115	Pengelolaan Sumber Daya Manusia									631.818.804	725.136.380	782.190.114	843.732.832	910.117.729	Biro Sumber Daya Manusia
16	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	01- Tersedianya Kepegawaian BP Batam Secara Profesional	Indeks sistem merit	Indeks	280	285	290	300	320	631.818.804	725.136.380	782.190.114	843.732.832	910.117.729	
			Persentase pegawai yang mengikuti program pengembangan kompetensi	Persenan	5	5	6	6	6						
5116	Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran									6.471.418	6.447.812	6.954.911	7.502.123	8.092.390	Biro Keuangan
17	Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran	01- Tersedianya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran	Indeks	83	94	84	96	86	6.471.418	6.447.812	6.954.911	7.502.123	8.092.390	
			Persentase bryan perbendaharaan yang terselesaikan tepat waktu	Persenan	100	100	100	100	100						
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum									6.703.139	7.372.280	7.952.311	8.576.000	9.252.918	Biro Hukum
18	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	01- Tersedianya Regulasi dan layanan hukum yang Mendukung Kinerja BP Batam	Persentase pemberian pelayanan hukum dan penanganan perkara yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi	Persenan	100	100	100	100	100	6.703.139	7.372.280	7.952.311	8.576.000	9.252.918	
			Persentase penyelesaian penyusunan peraturan dan peraturan	Persenan	100	100	100	100	100						
5122	Penguatan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan									3.226.766	3.963.891	4.275.789	4.612.187	4.975.974	Satuan Pemeriksa Intern
18	Penguatan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	01- Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur dan Lembaga BP Batam	Tindak lanjut rekomendasi BPK	Persenan	95	95	95	95	95	3.226.766	3.963.891	4.275.789	4.612.187	4.975.974	
			Indeks kapabilitas AP/TP	Indeks (Skala 1-100)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40						
7999	Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja									4.099.359	5.306.785	5.724.322	6.174.709	6.660.535	Biro Organisasi, Kaputuhan dan Manajemen Risiko
28	Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja	01- Terwujudnya tata kelola organisasi, kaputuhan, kinerja dan manajemen risiko yang profesional	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	88	88	A	A	AA	4.099.359	5.306.785	5.724.322	6.174.709	6.660.535	
			Nilai manajemen risiko	Indeks (Skala 1-5)	3	3	2	2	2						
			Indeks pelayanan publik	Indeks (Skala 0-5)	4,01	4,02	4,03	4,04	4,05						
			Nilai SAKIP	Indeks (Skala 1-100)	81	82	83	84	85						

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp/Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	<b>Sasaran Perencanaan Batas</b>									1.682.726.189	2.447.944.630	2.643.933.124	2.848.311.848	3.072.417.031	
WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>									886.814.284	1.896.028.951	1.185.498.689	1.278.774.847	1.379.368.679	
A2	<b>Anggaran Bidang Kebijakan Strategis</b>									182.803.192	366.813.898	182.948.444	194.212.789	205.493.379	
0113	<b>Penyusunan Penetapan Program Strategis</b>									37.370.018	45.906.809	49.518.789	53.414.635	57.817.635	Pusat Perencanaan Program Strategis
21	Penyusunan Perencanaan Program Strategis	01- Tersedianya dokumen perencanaan strategis dan kajian kebijakan yang berkualitas	Indeks perencanaan pembangunan	Indeks	92	92	93	93	93	37.370.018	45.906.809	49.518.789	53.414.635	57.817.635	
Perentase pemanfaatan dokumen kajian kawasan dan bila bangunan aset undifinansial			Person	100	100	106	100	100							
Perentase pemanfaatan dokumen kajian SDA dan lingkungan dan undifinansial			Person	100	100	106	100	100							
Perentase pemanfaatan dokumen kajian kepelabuhanan, kelengkapan dan konektivitas darat oleh institusi lain			Person	100	100	106	100	100							
0070	<b>Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis</b>									8.020.279	16.346.578	11.154.175	12.031.785	12.978.450	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis
32	Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis	01- Tereajudinya harmonisasi kebijakan organisasi dan dukungan strategis	Indeks kualitas kebijakan	Indeks (Skala 1-100)	65	66	67	68	69	8.020.279	16.346.578	11.154.175	12.031.785	12.978.450	
Indeks reformasi futur			Indeks	AA	AA	AA	AA	AA							
Perentase kebijakan strategis pimpinan yang ditindaklanjuti			Person	90	90	90	96	96							
Perentase rekomendasi yang dimanfaatkan			Person	80	80	80	85	90							
0071	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>									12.506.324	23.578.757	24.794.668	26.734.618	28.836.089	Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	01- Meningkatnya Kecepatan dan Akuntabilitas Pelayanan Investasi di KPSPS Batam	Indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan investasi	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90	12.506.324	23.578.757	24.794.668	26.734.618	28.836.089	
Perentase penyelesaian keluhan sesuai kewenangan BP Batam yang sesuai tepat waktu			Person	100	100	106	100	100							
Tingkat implementasi kebijakan transformasi digital BPSP			Person	80	80	80	83	86							
0072	<b>Pengalihan Data Center dan Teknologi Informasi</b>									44.603.671	87.684.674	66.986.151	182.031.370	150.066.187	Pusat Data dan Sistem Informasi
24	Pengalihan Data Center dan Teknologi Informasi	01- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi di BP Batam	Tingkat kematangan SPDC	Indeks (Skala 0-6)	3,8	4,1	4,2	4,4	4,5	44.603.671	87.684.674	66.986.151	182.031.370	150.066.187	
Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPDC			Indeks (Skala 0-5)	3,2	3,5	3,7	4	4,1							
Indeks pembangunan statistik			Indeks (Skala 0-5)	2,8	3	3,3	3,8	3,8							

**Lampiran 2 (a)**  
**Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Pendanaan APBN dan Non-APBN Tahun 2025-2029**  
 (Usulan RPJMN 2025-2029)

No	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Indikator	Peningkatan Indikator	Target Total	Target (Tahun)					Alokasi APBN (Rp. Juta)										Total APBN (Rp. Juta)									
				Target (Tahun)					PNBP					Total PNDP (Rp. Juta)						Total RM (Rp. Juta)								
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029										
<b>Selain Pengembalian Baten</b>														575.895	665.785	771.448	857.599	995.814	3.776.512	-	2.068.733	2.798.913	3.068.917	3.568.906	13.901.899	16.775.471		
<b>A Peningkatan dan Sarana Bidang Konektivitas Laut</b>														-	36.000	58.450	228.000	407.969	705.428	-	140.358	-	-	-	140.358	524.969		
1	Pengembangan Fasilitas Terminal Batu Ampar Indikator: Jumlah kapasitas bongkar muat per jam (Damage Unit) (TU/Jam)	Prioritas Nasional 1	1.000.000 TU/Jam	640.000	620.000	720.000	780.000	1.000.000	-	30.000	47.450	142.000	417.189	857.428	-	138.430	-	-	-	138.430	745.699							
	1.a Jumlah kapasitas bongkar muat per jam (Damage Unit) (TU/Jam)		1.000.000 TU/Jam	640.000	620.000	720.000	780.000	1.000.000	-	30.000	41.000	142.000	417.189	857.428	-	138.430	-	-	-	138.430	713.218							
	1.b Jumlah kapasitas bongkar muat per jam (Damage Unit) (TU/Jam)		1.000.000 TU/Jam	1.300.000	1.380.000	1.430.000	1.450.000	1.500.000	36.000	41.000	142.000	417.189	857.428	-	138.430	-	-	-	-	138.430	713.218							
	1.c Pengembangan sarana pelabuhan		2 Unit	-	-	2 Unit	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	30.000								
2	Pengembangan Fasilitas Terminal Durah Cak Kaki Indikator: Jumlah kapasitas bongkar muat barang di terminal Cak Kaki (TU)	Prioritas Nasional 1	3.000.000 TU	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	12.000	60.000	60.000	122.000	-	-	-	-	-	-	322.000							
3	Pengembangan Fasilitas Terminal Pengangkutan Darat ke dan dari Bandara Internasional Indikator: Jumlah penumpang terminal darat ke dan dari Bandara Internasional (Dg/TW)	Prioritas Nasional 1	9.700.000 Dg/TW	5.000.000	8.700.000	9.000.000	9.200.000	9.700.000	-	-	-	34.000	-	34.000	-	32.500	-	-	-	32.500	66.500							
<b>B Peningkatan dan Sarana Bidang Konektivitas Udara</b>														-	-	-	-	-	64.187	116.000	174.187	-	15.000	-	-	-	15.000	189.187
4	Pengembangan Fasilitas Pemungutan Bandara Udara Indikator: Jumlah penumpang (Dg/TW)	Prioritas Nasional 3	9 jt Dg/TW	-	-	-	-	9.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	Pengembangan Fasilitas Kargo Bandara Udara Indikator: Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/TW)	Prioritas Nasional 3	8.680 Ton/TW	-	-	-	-	8.680	-	-	-	-	-	116.000	116.000	-	-	-	-	-	116.000							
6	Pengembangan Fasilitas Kawasan Bandara Udara Indikator: Jumlah fasilitas kawasan yang dikembangkan (Unit)	Prioritas Nasional 3	7 Unit	-	-	-	7	-	-	-	-	64.187	-	64.187	-	15.000	-	-	-	15.000	79.187							
<b>C Peningkatan dan Sarana Air Bersih</b>														152.025	38.790	38.712	303.859	34.625	518.911	-	891.092	1.035.330	1.035.330	1.335.330	4.801.692	4.801.692		
7	Pengembangan fasilitas air baku Indikator: Jumlah baku air yang dibagikan (Litri)	Prioritas Nasional 3	1 Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035.330	1.035.330	1.035.330	3.800.000							
8	Pengembangan fasilitas air minum Indikator: Jumlah instalasi volume air minum yang terakumulasi (Mandala)	Prioritas Nasional 3	1.280 gal	-	20	-	270	1800	-	23.000	-	112.214	25.384	160.714	-	-	-	-	200.000	200.000	360.714							
9	Pengembangan fasilitas distribusi air minum Indikator: Jumlah panjang jaringan pipa distribusi terakumulasi (Km)	Prioritas Nasional 3	77,5 Km	43,8	10,2	22,7	-	-	118.522	15.725	35.000	-	-	169.247	-	431.594	-	-	-	431.594	618.222							
10	Pengembangan fasilitas pengolahan air minum Indikator: Jumlah fasilitas pengolahan air minum (Unit)	Prioritas Nasional 3	4 Unit	1	-	1	1	1	25.982	-	25.112	26.545	8.222	175.361	-	242.748	-	-	-	242.748	420.128							
<b>D Peningkatan dan Sarana Bidang Kesehatan</b>														-	85.658	-	82.872	64.000	196.072	-	-	-	-	-	-	-	-	196.072
11	Pengembangan pusat kesehatan berkelas internasional Indikator: Jumlah bangunan layanan RSPP kelas yang dibangun (Unit)	Prioritas Nasional 3	4 Unit	-	2	-	2	-	83.000	-	72.872	-	15.000	64.000	64.000	-	-	-	-	-	128.072							
12	Peningkatan peralatan kesehatan berkelas internasional Indikator: Jumlah peralatan kesehatan (Unit)	Prioritas Nasional 3	5 Unit	-	-	-	2	1	-	-	19.000	64.000	64.000	-	-	-	-	-	-	64.000								
<b>E Peningkatan dan Sarana Pengembangan Kawasan</b>														136.000	82.179	37.740	48.363	9.369	294.291	-	407.522	-	-	-	-	407.522	701.814	
13	Pengembangan fasilitas kawasan dan raga dan pariwisata Indikator: Jumlah aset yang dikembangkan (Kawasan)	Prioritas Nasional 3	7 Kawasan	-	-	3	3	1	-	-	28.065	37.000	16.000	75.065	-	59.517	-	-	-	59.517	134.780							
14	Pengembangan fasilitas kawasan pariwisata dan raga Indikator: Jumlah kawasan yang dikembangkan (Unit)	Prioritas Nasional 3	6 Unit	380	8	-	-	-	136.000	62.179	-	-	-	198.226	-	264.460	-	-	-	264.460	462.686							
15	Pengembangan fasilitas air bersih IPAL Indikator: Jumlah IPAL yang dibangun (Unit)	Prioritas Nasional 3	4 Unit	-	-	2	3	-	-	8.478	14.683	-	-	23.161	-	83.655	-	-	-	83.655	106.813							
<b>F Peningkatan dan Sarana Konektivitas Darat</b>														287.976	481.225	584.146	222.649	228.000	1.815.001	-	1.826.008	1.567.278	2.727.278	3.229.067	8.197.274	9.974.246		
16	Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Indikator: Panjang jalur yang dibangun (Km)	Prioritas Nasional 3	15 Km	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
17	Pembangunan Flyover Indikator: Panjang Flyover yang dibangun (Unit)	Prioritas Nasional 3	508 unit	-	-	41	200	200	-	-	-	-	-	-	-	280.008	-	-	-	280.008	280.008							
18	Pembangunan Jalan Lingkar Indikator: Panjang jalan lingkar yang dibangun (Km)	Prioritas Nasional 3	18,4 Km	-	-	2,4	7,5	7,5	-	-	-	-	-	-	-	1.086.667	2.229.667	2.229.667	-	5.520.000	5.520.000							
19	Peningkatan Jalan Transmigrasi Indikator: Panjang jalan transmigrasi yang dibangun (Km)	Prioritas Nasional 3	38,8 Km	-	-	20,4	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-	580.613	580.613	-	-	1.801.225	1.801.225							
20	Pembangunan, Peningkatan Jalan, Drainase dan Lanskap di Jalan/Bundaran Indikator: Panjang jalan yang dibangun (Km)	Prioritas Nasional 3	73,2 Km	12,8	10,145	10,1	11,2	20	267.812	481.225	584.146	222.649	228.000	1.815.001	-	1.426.369	-	-	-	1.426.369	3.262.020							

**Lampiran 2 (b)**  
**Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Pendanaan APBN dan Non-APBN Tahun 2025-2029**  
 (Usulan RPJMN 2025-2029)

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Indikator	Penetapan Indikator	Target Total	Alokasi Non-APBN (Rp Juta)					Total Non-APBN (Rp Juta)	Total (Rp Juta)					Grand Total (Rp Juta)
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Batam Pengangkutan Batas</b>				<b>164.878</b>	<b>838.878</b>	<b>836.978</b>	<b>2.283.514</b>	<b>2.387.875</b>	<b>8.836.824</b>	<b>760.873</b>	<b>4.686.478</b>	<b>4.812.539</b>	<b>7.301.718</b>	<b>8.773.384</b>	<b>22.814.484</b>
<b>A. Prasarana dan Sarana Bidang Konektivitas Laut</b>				<b>364.878</b>	<b>164.078</b>	<b>164.878</b>	<b>1.868.365</b>	<b>1.082.875</b>	<b>2.436.806</b>	<b>364.878</b>	<b>274.488</b>	<b>226.428</b>	<b>1.285.956</b>	<b>1.546.784</b>	<b>3.486.774</b>
1	Pengembangan Fasilitas Terminal Batu Ampar Indikator: -	Prioritas Nasional 3	-	364.878	164.078	164.878	1.868.365	1.082.875	2.436.806	364.878	315.968	212.428	1.301.946	1.598.768	2.300.274
1a Jumlah kapasitas bongkar muat per tahun (Derraga Ular) (Tahun)			1.036.000 Tahun	364.878	164.078	164.878	1.868.365	1.082.875	2.436.806	364.878	364.878	164.878	1.048.398	1.382.378	2.036.808
1b Jumlah kapasitas bongkar muat barge Dermaga Selatan-Timur dan Megoban			1.500.000 Ton	-	-	-	-	-	-	-	38.330	41.500	540.806	417.180	670.610
1c Pengembangan kantar pelabuhan			2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	5.690	-	-	5.690
2	Pengembangan Fasilitas Terminal Cahay Arie Kabil Indikator: Jumlah kapasitas bongkar muat barge di terminal Kabil (Ton)	Prioritas Nasional 3	3.680.000 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	52.808	68.000	80.000	132.808
3	Pengembangan Fasilitas Terminal Penumpang Domestik dan Internasional Indikator: Jumlah penumpang domestik dan internasional (Org/Tahun)		8.700.000 Org/Tahun	-	-	-	-	-	-	-	32.800	-	24.000	-	56.800
<b>B. Prasarana dan Sarana Bidang Konektivitas Udara</b>				<b>-</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>436.937</b>	<b>485.000</b>	<b>1.689.937</b>
4	Pengembangan Fasilitas Penumpang Bandara Utama Indikator: Jumlah penumpang (Org/Tahun)	Prioritas Nasional 3	9,8 Org/Tahun	-	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000	-	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
5	Pengembangan Fasilitas Kargo Bandara Udara Indikator: Jumlah kapasitas kargo/bandara (Ton/Tahun)		8.680 Ton/Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	110.000
6	Pengembangan Fasilitas Koneksi Bandara Udara Indikator: Jumlah fasilitas koneksi yang dilayaknkan (Unit)		7 Unit	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	64.107	-	79.107
<b>C. Prasarana dan Sarana Air Bersih</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.878</b>	<b>708.482</b>	<b>1.223.446</b>	<b>1.336.930</b>	<b>1.367.809</b>	<b>4.689.674</b>
7	Pengembangan fasilitas air baku Indikator: Jumlah wadah baku yang terlayaknkan (Unit)	Prioritas Nasional 5	1 Unit	-	-	-	-	-	-	182.878	708.482	1.223.446	1.336.930	1.367.809	4.689.674
8	Pengembangan fasilitas air minum Indikator: Fasilitas rumah air minum yang terlayaknkan (Unit)		1.200 Unit	-	-	-	-	-	-	-	23.025	-	112.214	225.294	360.743
9	Pengembangan fasilitas distribusi air minum Indikator: Jumlah panjang jaringan pipa distribusi terlayaknkan (Km)		77,3 Km	-	-	-	-	-	-	116.832	447.689	99.000	-	-	673.521
10	Pengembangan fasilitas pengolahan air minum Indikator: Jumlah fasilitas pengolahan air minum (Unit)		3 Unit	-	-	-	-	-	-	38.940	269.788	36.112	98.845	9.232	432.126
<b>D. Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.880</b>	<b>-</b>	<b>98.872</b>	<b>64.000</b>	<b>186.672</b>	
11	Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional Indikator: Jumlah bangunan layanan P500+ Dana yang terlayaknkan (Unit)	Prioritas Nasional 5	4 Unit	-	-	-	-	-	-	52.880	-	72.872	-	125.752	
12	Peningkatan peralatan kesehatan berskala internasional Indikator: Jumlah peralatan kesehatan (Unit)		3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	64.000	76.000	
<b>E. Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128.868</b>	<b>480.221</b>	<b>37.748</b>	<b>48.800</b>	<b>59.690</b>	<b>716.687</b>
13	Pengembangan fasilitas kawasan elit raga dan pariwisata Indikator: Jumlah unit yang akan dibangun (Kawasan)	Prioritas Nasional 5	7 Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	55.017	28.808	37.000	10.000	130.825
14	Pengembangan fasilitas kawasan pemukiman dan bisnis Indikator: Jumlah kawasan yang dibangun (Unit)		8 Unit	-	-	-	-	-	-	128.868	326.609	-	-	-	455.477
15	Pengembangan fasilitas air limbah PPA Indikator: Jumlah PPA yang terlayaknkan (Unit)		4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	83.655	8.875	11.600	-	104.130
<b>F. Prasarana dan Sarana Konektivitas Darat</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850.119</b>	<b>850.888</b>	<b>1.700.119</b>	<b>287.818</b>	<b>2.117.404</b>	<b>2.151.428</b>	<b>3.818.947</b>	<b>3.386.687</b>	<b>11.673.364</b>
16	Pengembangan Light Rapid Transit (LRT) Indikator: Panjang jalur lin perantara (Km)	Prioritas Nasional 5	11 Km	-	-	800.000	880.000	1.700.000	-	-	-	800.000	880.000	1.700.000	
17	Pengembangan Flyover Indikator: Panjang Flyover yang dibangun (meter)		506 meter	-	-	-	-	-	-	-	280.000	-	-	-	280.000
18	Pengembangan Jalan Lingkar Indikator: Panjang jalan lingkar yang dibangun (Km)		18,4 Km	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096.607	2.228.667	2.228.667	5.520.000
19	Peningkatan Jata Transbarateng Indikator: Panjang jalan transbarateng yang dibangun (Km)		28,8 Km	-	-	-	-	-	-	-	-	620.813	620.813	-	1.241.626
20	Pengembangan Peningkatan Jalan, Drainase dan Laspak Medan/Bundaran Indikator: Panjang jalan yang dibangun (Km)		73,3 Km	-	-	-	119	-	119	287.818	1.917.414	894.148	232.768	230.000	3.282.130

**Lampiran 3**  
**Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian (Tahun)
1	Pengaturan pembentukan Dewan Kawasan	Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 masa tugas Dewan Kawasan KPBPB Batam telah berakhir sejak tanggal 21 Februari 2021 dan belum ada Pembentukan Dewan Kawasan yang baru	Internal: - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian	2025
2	Pengaturan status kelembagaan	Belum adanya pengaturan status kelembagaan BP Batam yang menegaskan BP Batam sebagai instansi K/L, sedangkan pola pengelolaan keuangan mengikuti peraturan BLU	Internal: - Biro Hukum Eksternal: - Kementerian PAN dan RB - Kementerian Setneg	2026
3	Pengaturan status kepegawaian	Belum adanya pengaturan status kepegawaian BP Batam yang menjadi monostatus. Saat ini pegawai PNS di BP Batam merupakan status diperbantukan atau dipekerjakan dari berbagai kementerian/ lembaga lain, sehingga BP Batam perlu memiliki nomenklatur sendiri sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 pegawai BP Batam terdiri dari PNS dan Non PNS, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 pegawai BP Batam dapat berasal dari ASN, Non ASN dan Tenaga Profesional, sehingga perlu aturan khusus berupa Peraturan Pemerintah	Internal: - Biro Sumber Daya Manusia - Biro Hukum Eksternal: - Kementerian PAN dan RB - Kementerian Setneg	2027
4	Pengaturan sinkronisasi perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025	Adanya perizinan sesuai PP 41 Tahun 2021 yang saat ini masih dikeluarkan oleh instansi lain yaitu di bidang Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Internal: - Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pusat Perencanaan Program Strategis Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Setneg - Kementerian Kehutanan - Kementerian KKP	2025
5	Pengaturan percepatan perizinan investasi	Adanya perizinan yang masih dikeluarkan dari instansi pusat dan daerah seperti Andal oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan dan Persetujuan Bangunan dan Gedung oleh Pemerintah Kota agar menjadi kewenangan BP Batam kembali	Internal: - Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pusat Perencanaan Program Strategis Eksternal: - Kementerian Lingkungan Hidup - Pemerintah Kota Batam	2025
6	Pengaturan percepatan penerbitan status HPL di Pusu Rempang dan Pulau Galang	Belum adanya pengaturan untuk percepatan penerbitan HPL Rempang dan Galang oleh Kementerian ATR/BPN sehingga berdampak pada rencana investasi pengembangan di PSN Rempang Eco City dan PSN Kawasan Industri Wiraja Galang	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian ATR/BPN - Kementerian PPN/Bappenas	2025
7	Pengaturan Pulau Tanjung Sauih dan Pulau Ngenang masuk dalam KPBPB Batam	Adanya potensi pasar transshipment sebesar 70 juta TEUs di perairan selat Philips yang dapat ditarik ke Indonesia, namun P. Tanjung Sauih dan P. Ngenang belum termasuk dalam wilayah KPBPB Batam, sehingga perlu ditetapkan sebagai bagian dari wilayah kerja KPBPB Batam dan menetapkannya sebagai pelabuhan HUB Transshipment untuk wilayah Indonesia Bagian barat	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian ATR/BPN - Kementerian PPN/Bappenas	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian (Tahun)
8	Pengaturan keluar masuk barang kontainer khusus di Wilayah KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan khusus keluar masuk barang kontainer di wilayah KPBPB Batam antara Kementerian Keuangan Cq. Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan BP Batam	Internal: - Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan - Direktorat Lalin Barang - Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Keuangan - Kementerian Perdagangan	2025
9	Pengaturan Rencana Rinci (RRP) khususnya 5 Wilayah Penataan dan Pengembangan	Belum adanya pengaturan RRP yang menjadi Kawasan Prioritas Pembangunan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 dan mempedomani Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK yang selanjutnya menjadi acuan/pedoman tata ruang di KPBPBP Batam	Internal: - Pusat Perencanaan Program Strategis - Direktorat Pengelolaan Lahan - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian AT/R/BPN - Kementerian PPN/Bappenas	2025
10	Pengaturan pengelolaan prasarana jalan di KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan pemeliharaan jalan di wilayah KPBPB Batam yang merupakan aset BP Batam, sehingga diperlukan peraturan terkait potensi PNPB terhadap penggunaan jalan melalui pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pajak Penyerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Kota.	Internal: - Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis - Direktorat Pengembangan KPBPB dan KEK - Direktorat Pembangunan Infrastruktur - Biro Hukum Eksternal: - Pemerintah Provinsi Kepri - Pemerintah Kota Batam	2026
11	Pengaturan penindakan bangunan dan pemanfaatan hulu tidak berizin di wilayah kerja KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan penindakan terhadap bangunan tidak berizin dan pemanfaatan catchment area oleh Direktorat Pengamanan Aset BP Batam	Internal: - Direktorat Pengamanan Aset - Direktorat Pelayanan Perencanaan - Direktorat Infrastruktur Kawasan - Biro Hukum dan Organisasi Eksternal: - Kepolisian Daerah dan Kota - Pemerintah Kota Batam	2026
12	Pengaturan alokasi tanah yang efektif sesuai perencanaan pembangunan kawasan Bareleng untuk peningkatan investasi	Belum adanya pengaturan penyelesaian 7 ribu hektar lahan menganggur dari 700 proyek yang mangkrak yang hingga saat ini masih menghambat investasi di Batam. Selanjutnya perlu regulasi terkait pembangunan penukiman vertikal dan membatasi rumah tapak.	Internal: - Direktorat Pelayanan Pertanahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK - Biro Hukum dan Organisasi Eksternal: - Kementerian AT/R/BPN - Pemerintah Kota Batam	2027
13	Pengaturan hubungan kerja antara BP Batam dengan Pemko Batam	Belum adanya pengaturan hubungan unit kerja antara BP Batam dengan Pemerintah Kota terkait bidang Pariwisata dan PBK, Kehutanan, Perikanan di Kawasan DAM	Internal: - Biro Hukum - Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Pemerintah Kota Batam	2028



# RENCANA STRATEGIS BP BATAM

## 2025-2029

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



[BPBATAM.GO.ID](http://BPBATAM.GO.ID)

KANTOR BATAM  
JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE,  
PULAU BATAM, KEPULAUAN RIAU, INDONESIA  
(+62) 778 - 462 047 / 462 048  
[HUMAS@BPBATAM.GO.ID](mailto:HUMAS@BPBATAM.GO.ID)

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA  
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 24, JAKARTA TIMUR, DKI  
JAKARTA, INDONESIA  
+6221-8580009 / 8580010  
[KP.JKT@BPBATAM.GO.ID](mailto:KP.JKT@BPBATAM.GO.ID)

KEPALA URUSAN EKONOMI INTERNASIONAL BP  
BATAM DI SINGAPURA  
MICHAEL GOUTAMA  
+65-9699 1000  
[MGOUTAMA@NEX2MAIL.COM](mailto:MGOUTAMA@NEX2MAIL.COM)